

LAPORAN PENELITIAN
KEPEDULIAN PEMEGANG HPH DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUTAI
(Studi Kasus pada PT. Oceanias Timber Products)

Oleh :

DR. YONATHAN PONGTULURAN, SE, M.Agr.
DRS. JIUHARDI
IR. DARHAWAN BILUNG

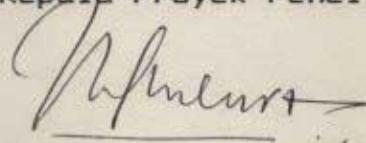
Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Bersumber dari dana pinjaman Bank Dunia XXI (LOAN) No. 3311-IND dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 18/P4M/DPPM/L.331/92/PSL/1994
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal : 15 Juni 1994

PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
1995

LEMBARAN IDENTITAS PENGESAHAN

1. a. Judul : KEPEDULIAN PEMEGANG HPH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUTAI (Studi kasus pada PT. Oceanias Timber Products)
- b. Macam Penelitian : Survey
- c. Kategori : Menunjang Pembangunan
-
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap : DR. Yonathan Pongtuluran, SE, M.Agr.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol./NIP : Penata Tkt. I / IIIId / 130 680 682
- d. Jabatan Sekarang : Koordinator Operasional Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi UNMUL (Lektor)
- e. Fakultas/Program :
Study : Ekonomi / Studi Manajemen
- f. Universitas : Mulawarman Samarinda
-
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
-
4. Lokasi Penelitian : Kecamatan Muara Ancalong
-
5. Sumber Pembiayaan : Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
DIP. No. 18/P4M/ DPPM/L.3311/92/PSL/94,
Tanggal, 15 Juni 1994
-
6. Jangka Waktu Penelitian : 10 (sepuluh) bulan
-
7. Biaya yang disetujui: Rp. 7.340.000,00 (Tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
-

Samarinda, April 1995
Kepala Proyek Penelitian,



Mengetahui :
Kepala Proyek Penelitian,
UNMUL,



DR. Yonathan Kustiawan M.Agr.Sc. DR. Yonathan Pongtuluran, SE, M.Agr.
NIP. 130 675 862 NIP. 130 680 682

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Mulawarman,



DR. I. Djubriansyah, M.Sc.
NIP. 130 608 472

Mengetahui :
Fakultas Ekonomi
Universitas Mulawarman,



Hainie Syahrani, M.Com.
NIP. 130 369 045

THE CONCERNS OF FOREST CONCESSION HOLDERS FOR POVERTY ERADICATION
IN KUTAI REGENCY

(A Case Study of PT. Oceanias Timber Products)

Yonathan Pongtuluran *), Jiuhardi *), and Darhawan Bilung **)

Abstract

PT. Oceanias Timber Products is one of business enterprises dealing with forest concession which is located in Sub District Muara Ancalong, (Sungai Kelinjau and Sungai Marah), in Kutai Regency. The area of forest concession covers 200.000,- hectare, and during 22 years of its operation, the average width of cutting area is approximately 3,300.41 hectare per year with the average of production volume of logs amounts 120,974.86 M3 per year.

The number of labor forces are 517 people, consisting of 167 local labors. This means that the concerns of forest concession to employ local labor forces is about 32.30 % of the whole. The income per capita of the population in and nearby forest concession area of PT. Oceanias Timber Products is Rp. 23,133.15/capita/month or Rp. 277.598.28/capita/year. If we comparing with the average income of poverty population in the villages in East Kalimantan which amounts Rp. 29,011/capita/month or Rp. 348,132/capita/year, it can be said that the income per capita of the populations who live in and nearby the forest concession area of PT. Oceanias Timber Products are still below the poverty line.

The research result taken from the local community perception toward forest rural development (HPH Bina Desa Hutan) which is operated by PT. Oceanias Timber Products, by nature, indicates "Good".

*) Faculty of Economic, Mulawarman University, Samarinda, East Kalimantan.

***) Faculty of Agriculture, Mulawarman University, Samarinda, East Kalimantan.

Then, when the success criterion is employed to evaluate the implementation of the forest rural development, with the decree of Directorate General of Forest enterprise No.288/KPTS/IV-PHH/1992, November 7, 1992, indicated 90, which means successful or good.

The implementation of forest rural development is one of government efforts in cooperation with Indonesian forest concession holders to improve population welfares who live in and nearby forest concession areas. During implementation of forest concession from 1991/1992 - 1993/1994 the total funds done by PT. Oceanias Timber Products toward forest rural development amounts Rp.250,133,000,- or 97.54 % of the budgets.

When viewing from profits received by PT. Oceanias Timber Products, when comparing to the budget realisation for implementation of forest rural development from 1991 to 1993, the data shows that the total fund which is allocated by PT. Oceanias Timber Products toward implementation program of forest rural development is 5.82 % from profit before tax per year or 7.87 % from profit after tax.

So, to improve social welfares of the community in and nearby forest concession areas, the holders' concerns of the PT. Oceanias Timber Products are highly expected to improve the employment of local labor forces, the budget realisation of forest concession implementation, the quality of human resources through formal and non formal educations, and cooperation with related economic entities in the villages, such as : rural cooperatives (Koperasi Unit Desa) with company cooperative of PT. Oceanias Timber Products for product marketing yielded by the community as agriculture, animal husbandry, fishing, handicrafts, and the like.

ABSTRAK

PT. Oceanias Timber Products adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan hutan yang berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong (Sungai Kelinjau dan Sungai Marah), Kabupaten Kutai. Areal Hak Pengusahaan Hutan seluas 200.000 Ha, dan selama beroperasi 22 tahun luas tebangan rata-rata 3.300,41 Ha per tahun dengan volume produksi kayu bulat rata-rata sebesar 120.974,86 M3 per tahun.

Jumlah tenaga kerja yang ada sebanyak 517 orang, dan di dalamnya terdapat tenaga kerja lokal (penduduk di dalam dan disekitar HPH) sebanyak 167 orang, yang berarti kepedulian pemegang HPH untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal sekitar 32,30 % dari tenaga kerja keseluruhan.

Rata-rata pendapatan perkapita penduduk di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products sebesar Rp. 23.133,15/jiwa/bulan atau sebesar Rp.277.598,28/jiwa/tahun. Bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan penduduk miskin untuk Desa di Kalimantan Timur yang mencapai sebesar 29.011/jiwa/bulan atau sebesar Rp. 348.132,-/jiwa/tahun, berarti pendapatan perkapita penduduk yang tinggal di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products masih berada di bawah garis kemiskinan.

Sesuai dengan hasil penelitian tentang tanggapan masyarakat setempat terhadap kegiatan HPH Bina Desa Hutan yang dijalankan perusahaan pada prinsipnya adalah baik (positif). Selanjutnya dengan digunakannya penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 288/KPTS/IV-PHH/1992, tanggal 7 November 1992, menunjukkan hasil sebesar 90 yang berarti termasuk dalam kategori Berhasil atau "Baik".

Pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan adalah merupakan salahsatu upaya pemerintah yang bekerja sama dengan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (Pemegang HPH) di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di dalam dan disekitar HPH. Selama program HPH Bina Desa Hutan dilaksanakan sejak tahun 1991/1992 - 1994/1995, secara keseluruhan jumlah dana yang telah direalisasikan oleh PT. Oceanias Timber Products terhadap Desa-

desa binaannya sebesar Rp. 250.133.000,- atau sekitar 97,54 % dari yang dianggarkan.

Ditinjau dari segi jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan, maka berdasarkan data yang diperoleh mulai tahun 1991 - 1993, diketahui bahwa besarnya dana yang dapat dialokasikan PT. Oceanias Timber Products terhadap pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan tersebut rata-rata sebesar 5,82 % dari laba sebelum pajak per tahun atau 7,87 % dari laba sesudah pajak.

Dengan demikian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar HPH, diharapkan kepedulian perusahaan dalam meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja lokal, meningkatkan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non-formal (keterampilan) dan meningkatkan kerjasama dalam mengaktifkan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa misalnya antara Koperasi Unit Desa (KUD) dengan Koperasi Karaywan perusahaan untuk mengoptimalkan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat seperti hasil-hasil pertanian, ternak, ikan, produk-produk kerajinan dan hasil usaha masyarakat lainnya.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Pengasih sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian ini dilaksanakan cukup banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik sebagai penyandang dana penelitian dan yang mengusahakan sponsor dana maupun sewaktu mengadakan penelitian di lapangan.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman.
3. Pimpinan PT. Oceanias Timber Products di Samarinda dan segenap karyawannya di Camp Sungai Kelinjau Kecamatan Muara Ancalong yang telah bersusah payah membantu penulis dalam pengumpulan data di lapangan.
4. Anggota masyarakat Desa Long Nah (Dusun Muara Dun, Dusun Gemar Baru), Desa Melan dan Desa Long Pejeng yang telah bersedia memberikan informasi dalam kaitannya dengan penelitian ini.
5. Secara khusus kepada Bapak Uceng B.Eng. yang telah banyak membantu penulis baik dalam bentuk penyediaan data yang diperlukan dalam laporan ini maupun bantuan lainnya.
6. Rekan-rekan lain yang sempat membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga atas segala amal baik dari semua pihak yang ikut membantu penulis dalam penelitian ini, kiranya mendapatkan imbalan yang lebih besar dari Yang Maha Pengasih. Amin.

Samarinda, April 1995.-

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Identitas dan Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Foto	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pembangunan Ekonomi	5
B. Pengentasan Kemiskinan	9
C. Pola Usaha Tani	12
D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	15
E. Program HPH Bina Desa Hutan	17
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	26
A. Tujuan Penelitian	26
b. Manfaat Penelitian	27
BAB IV. METODE PENELITIAN	28
A. Definisi Operasional	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Metode Analisis Data	31
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	74

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1. Peruntukan lahan sesuai fungsi hutan PT. Oceanias Timber Products.	36
Tabel 5.2. Keadaan Hutan Areal PT. Oceanias Timber Products.	37
Tabel 5.3. Perkembangan produksi kayu bulat PT. Oceanias Timber Products, selama jangka waktu Pengusahaan Hutan, 1973 - 1995.	47
Tabel 5.4. Jumlah Pohon per hektar (N/Ha) dan volume pohon per hektar (M3/Ha) PT. Oceanias Timber Products.	49
Tabel 5.5. Status tenaga kerja PT. Oceanias Timber Products.	50
Tabel 5.6. Posisi jabatan tenaga kerja lokal berdasarkan kelompok pekerjaan PT. Oceanias Timber Products.	52
Tabel 5.7. Tingkat pendidikan tenaga kerja PT. Oceanias Timber Products.	53
Tabel 5.8. Perbandingan antara tenaga kerja lokal dengan Non-lokal, PT. Oceanias Timber Products.	54
Tabel 5.9. Tenaga teknis kehutanan Indonesia PT. Oceanias Timber Products.	55
Tabel 5.10. Tanggapan masyarakat di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products, tentang Program HPH Bina Desa Hutan.	60
Tabel 5.11. Rata-rata pendapatan Kepala Keluarga penduduk di dalam dan disekitar HPH dan Karyawan PT. Oceanias Timber Products.	61
Tabel 5.12. Rencana dan realisasi anggaran HPH Bina Desa Hutan, Tahun 1991/1992 - 1994/1995, PT. Oceanias Timber Products.	66
Tabel 5.13. Rangkuman Neraca perbandingan dan kondisi kesehatan PT. Oceanias Timber Products periode Tahun 1991 - 1993.	69
Tabel 5.14. Perbandingan antara laba sebelum pajak dengan realisasi anggaran HPH Bina Desa Hutan, PT. Oceanias Timber Products.	72

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	5.1. Struktur Organisasi PT. Oceanias Timber Products.	39
Gambar	5.2. Struktur Organisasi Bidang Pemungutan Hasil Hutan PT. Oceanias Timber Products.	40
Gambar	5.3. Struktur Organisasi Bidang Pembinaan Hutan PT. Oceanias Timber Products	41
Gambar	5.4. Struktur Organisasi Hutan Tanaman Industri (HTI), PT. Oceanias Timber Products.	42
Gambar	5.5. Struktur Organisasi HPH Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products	56
Gambar	5.6. Proses pemasaran hasil-hasil usaha masyarakat desa binaan PT. Oceanias Timber Products	90

DAFTAR PHOTO

	Halaman
Photo 5.1. Balai Pertemuan HPH Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products.	58
Photo 5.2. Areal HPH Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products.	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Selama kurun waktu 2 dasa warsa terakhir dari jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 190 juta, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan drastis menjadi tinggal sekitar 27 juta jiwa atau sekitar 15,08% dari jumlah penduduk.

Penduduk yang masih tergolong miskin tersebut sebagian besar tinggal di pedesaan terutama di desa-desa terpencil. Untuk Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,8 juta jiwa, merupakan salah satu propinsi dari ke 27 propinsi di Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang cukup berlimpah, sehingga daerah ini menjadi incaran para investor untuk menanamkan modalnya. (Anonim, 1993).

Sumber kekayaan alam yang paling menonjol dan yang telah dieksploitir hasil-hasilnya selama ini antara lain sumber daya hutan terutama untuk kayu bulat, minyak bumi/gas alam, batu bara, emas dan lain-lain. Khusus mengenai kayu bulat di Kalimantan Timur telah dieksploitasi secara besar-besaran yang dimulai pada tahun tujuh puluhan hingga awal tahun delapan puluhan.

Dalam pengeksplorasianya tersebut dipercayakan kepada pemegang HPH dan telah memberikan akibat nyata sebagai penghasil devisa negara terbesar di daerah ini.

Setelah itu produksi kayu bulat tidak lagi diproduksi untuk tujuan ekspor dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan industri kayu dalam negeri. Hal ini ditempuh pemerintah dengan maksud agar

kayu olahan tersebut dapat memberikan nilai tambah dipasaran internasional. Disamping itu juga dimaksudkan untuk dapat menggalakkan industri kayu dalam negeri yang selanjutnya dapat merekrut tenaga kerja lebih banyak dalam upaya mencegah meningkatnya pengangguran baik di kota maupun di pedesaan.

Walaupun demikian selama lebih 20 tahun hutan Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur dieksploitasi hasil-hasilnya oleh beberapa pemegang HPH, namun masyarakat yang tinggal di dalam maupun disekitar HPH belum dapat ikut menikmati hasil-hasilnya secara optimal. Yang lebih menarik perhatian untuk diteliti adalah karena masih banyaknya penduduk yang bermukim sejak dari nenek moyang mereka di dalam dan disekitar HPH, kehidupannya cukup memprihatinkan. Akhirnya seolah-olah jurang pemisah antara pemilik modal dengan penduduk desa setempat yang hidup berdampingan semakin melebar, dan akibatnya menimbulkan kecemburuan sosial bagi sebagian besar penduduk terutama bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk ikut menikmati hasil-hasil sumber daya hutan (kayu) tersebut.

Menurut hasil pemetaan Kantong (wilayah) kemiskinan diseluruh wilayah Indonesia oleh BPS (1993), Kalimantan Timur merupakan daerah yang menempati urutan Nomor 2 memiliki desa miskin di Indonesia setelah Timor Timur.

Dari 1106 desa di Kalimantan Timur terdapat 523 desa yang termasuk dalam kategori miskin. Desa miskin tersebut sebagian besar menyebar di dalam dan disekitar HPH terutama di Kabupaten Kutai.

Jumlah desa miskin yang terdapat di Kabupaten Kutai adalah 175 desa (Anonim, 1993). Mata pencaharian mereka umumnya bertani sebagai peladang berpindah-pindah dengan cara membuka hutan yang

ada disekitar desa mereka. Hasil-hasil pertanian yang diperolehnya relatif rendah karena dalam pengolahannya hanya dilakukan secara tradisional tanpa pupuk.

Kemudian setelah adanya kebijaksanaan baru dari pemerintah yang dituangkan dalam SK. Menteri Kehutanan No. 691/Kpts/-VI/1991, tanggal 10 Oktober 1991 dengan petunjuk teknis tertera pada SK. Dirjen Pengusahaan Hutan No. 211/Kpts/IV-PHH/92, tanggal 23 Januari 1992 tentang Pedoman Pembinaan Terhadap Pemegang HPH dalam rangka Bina Desa Hutan adalah merupakan angin baik bagi penduduk desa yang tinggal di dalam dan disekitar areal HPH.

Permasalahannya adalah sampai sejauh mana kepedulian pemegang HPH dalam melaksanakan HPH Bina Desa dapat memberikan akibat nyata dalam upaya meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat desa yang tinggal di dalam dan disekitar areal HPH yang dikelolanya.

Untuk menghindari adanya kecemburuan sosial yang disebabkan oleh adanya jurang pemisah antara pemilik modal dengan penduduk miskin yang semakin melebar, maka perlu diciptakan suasana yang harmonis, saling ketergantungan dan saling menguntungkan baik melalui kegiatan program Bina Desa Hutan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

B. Rumusan Masalah.

Dengan berdasarkan latar belakang seperti yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sampai seberapa besar tenaga kerja lokal dan dari luar daerah yang dapat direkrut oleh PT. Oceanias Timber Products di berbagai posisi jabatan untuk menunjang segala aktivitas perusahaan.
2. Berapa besarnya komoditi pangan/barang yang dipasok oleh PT. Oceanias Timber Products dari hasil produksi penduduk desa yang bermukim di dalam dan disekitar HPH.
3. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Oceanias Timber Products untuk membiayai Program HPH Bina Desa Hutan.
4. Bagaimana pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan oleh PT. Oceanias Timber Products ?. (Apakah sudah sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan yang telah ditetapkan oleh Menhut ?.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, mempunyai motivasi ekonomi dan menerapkan kebijaksanaan efisiensi untuk mencapai hasil yang optimal. Penerapan efisiensi tidak lain adalah penekanan biaya yang serendah-rendahnya yang tidak mengarahkan pada peningkatan hasil produksi. Oleh karena itu untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan, sebab perusahaan yang tidak untung tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawannya (Payaman Simanjuntak, 1985). Jadi untuk mencapai keuntungan yang optimal merupakan suatu kewajiban bagi setiap pengusaha. Untuk warga Negara Indonesia termasuk pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi berusaha menerapkan efisiensi, karena dengan efisiensi akan tercapai produktivitas yang tinggi.

Namun dalam hal penerapan kebijaksanaan tersebut hendaknya berpijak pada Pancasila dan UUD 1945, sebab pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pengamalan Pancasila (Anonim, 1987).

Agar pemerataan, keadilan dan tidak mengabaikan kepentingan orang banyak dapat tercapai, maka peranan pemerintah sangat diperlukan yang berpijak pada sistim Ekonomi Pancasila. Hal ini disebabkan karena setiap derap langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan,

bahkan merupakan perintis pembangunan yang kesemuanya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerataan dan keadilan akan terwujud, tentunya bila didukung oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Demokrasi Pancasila yang dijadikan Demokrasi Ekonomi Indonesia, mempunyai landasan Idiil Pancasila dan Landasan konstitusionil UUD 1945 Pasal 33 ayat 1,2 dan 3. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa :

- (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 tersebut, maka sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu pengusaha mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Sri Edi Swasono, 1981).

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, maka pemegang HPH adalah merupakan kelompok pemilik modal yang duduk berdampingan dengan sebagian besar masyarakat miskin di pedesaan sehingga wajarlah bila mereka berkewajiban untuk membina masyarakat desa yang berada di dalam dan disekitar areal HPH yang dikelolanya. Pembinaan ini apa yang disebut sebagai HPH Bina Desa Hutan.

Pembinaan masyarakat desa baik di dalam maupun di luar HPH, adalah merupakan usaha pemerintah dalam menciptakan suasana

yang dapat lebih mempererat hubungan antara Pemegang HPH dengan kelompok masyarakat yang ada disekitar HPH tersebut. Hal ini dimaksudkan agar 2 kelompok yang berdampingan dapat bekerja sama dan saling menunjang untuk mensukseskan pembangunan yang adil dan merata.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1988) telah mengamanatkan bahwa untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar segala usaha pemanfaatan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestariannya baik fungsi dan kemampuannya sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat baik generasi masa kini maupun generasi mendatang. (GBHN, 1988).

Dalam hubungannya dengan Industrial Pancasila (HIP), pengusaha atau Pemegang HPH mempunyai kewajiban untuk memanusiakan manusia yaitu pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, melalui pengupahan (gaji) yang memadai, pemberian jaminan sosial, biaya perawatan kesehatan dan lain-lain. Pengusaha hendaknya memperlakukan karyawannya sebagai manusia yang mempunyai harga diri, perasaan kemauan dan lain-lain, sehingga pengusaha tidak memandang karyawan sebagai faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia Indonesia yang perlu dibangun masa depannya yang cerah (Anonim, 1987).

Pemerintah telah berusaha membuat suatu program HPH Bina Desa Hutan yang mewajibkan para pengelola HPH untuk ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk desa di dalam dan disekitar HPH yang dikelolanya. Hal tersebut bagi pihak perusahaan mungkin dianggap merupakan sesuatu yang dipaksakan.

Umumnya sesuatu yang dipaksakan tidaklah memberikan hasil yang memuaskan. Tetapi bilamana dikaji lebih dalam dengan melihat dari segi ekonomi antara pemegang HPH dan penduduk desa yang bermukim baik di dalam maupun disekitar HPH, maka penduduk setempat bukanlah merupakan penghambat perusahaan melainkan merupakan asset perusahaan jika dilakukan pembinaan secara baik. Pemegang HPH dan penduduk setempat adalah merupakan dua kelompok sejoli yang duduk berdampingan yang seharusnya membentuk suatu hubungan yang harmonis, saling menunjang, saling memperhatikan antara satu sama lainnya sehingga dalam berbagai aktivitas terutama dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi masing-masing pihak dapat memperoleh keuntungan/manfaat yang lebih besar yang disebut dengan istilah External Economies.

Yang dimaksud dengan external economies tersebut adalah keuntungan, manfaat, nilai ekonomis yang diperoleh suatu perusahaan/ industri di luar perusahaannya karena kegiatan ekonomi perusahaan lain secara keseluruhan atau karena meluasnya output dari industri lainnya. (Moch. Sadli, 1959).

Dalam hal ini keuntungan yang dapat diperoleh bila dikaitkan antara penduduk desa dengan pemegang HPH antara lain :

- 1). Mendapatkan tenaga kerja lokal yang lebih banyak tahu tentang situasi lingkungan setempat untuk efisiensi;
- 2). Dapat memasukkan bahan pangan atau barang lain-lain dari penduduk desa;
- 3). Mendapat perlindungan dari masyarakat seperti keamanan serta manfaat-manfaat sosial lainnya.

Dilain pihak khususnya bagi penduduk desa yang bermukim di

dalam dan disekitar HPH bahwa dengan hadirnya perusahaan kayu (HPH) ditengah-tengah mereka berarti akan mendapatkan keuntungan berupa :

- 1). Dapat bekerja pada perusahaan;
- 2). Dapat menjual hasil usahanya kepada perusahaan baik langsung maupun tidak langsung seperti dengan melalui lembaga-lembaga ekonomi yang ada;
- 3). Mendapatkan bantuan dari perusahaan baik dana maupun bantuan non-ekonomi misalnya pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan formal dan non-formal dan lain-lain.

B. Pengentasan Kemiskinan.

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena tidak dikehendaki oleh simiskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Kemiskinan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Anonim, 1993).

Secara umum ada 4 sumber penyebab kemiskinan yang meliputi :

1. Mentalitas simiskin itu sendiri,

2. Minimnya keterampilan yang dimilikinya,
 3. Ketidak mampunya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan,
 4. Peningkatan jumlah penduduk yang relatif berlebihan.
- (Soerjani, 1987).

Dari uraian di atas, maka upaya-upaya perusahaan dalam ikut mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan melakukan pengembangan lembaga-lembaga ekonomi di pedesaan serta mendorong penduduk terutama yang mempunyai keterampilan dalam rangka menciptakan program-program industri kecil.

Dengan adanya sentra-sentra Industri kecil maupun kerajinan di Desa berarti akan turut mewarnai kegiatan ekonomi di desa tersebut serta sekaligus menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian dalam suatu desa.

Adapun kelompok Industri kecil tersebut terdiri dari 5 cabang industri yaitu :

1. Industri pengolahan bahan pangan
2. Industri sandang dan kulit
3. Industri kimia dan bahan bangunan
4. Industri kerajinan umum dan
5. Industri logam (Sayogyo, 1990).

Kemudian dalam kaitannya pengelolaan sumber daya hutan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek sosial ekonomi seperti banyak dikembangkan di Negara yang sedang berkem-

bang. Kondisi sosial ekonomi yang belum baik terutama bagi masyarakat yang bermukim di dalam dan disekitar areal HPH selama ini dapat disebabkan karena merosotnya hutan bahkan/kerusakan penghancuran hutan. Kemiskinan dan kurangnya pendidikan penduduk setempat yang hampir ditemui di daerah terpencil dapat menjadi pendorong terjadinya kerusakan hutan. Penebangan liar yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah semata-mata guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tentu saja karena mereka tidak tahu apa akibat ekologisnya berupa kerusakan hutan yang berakibat lebih lanjut seperti terjadinya erosi, mengurangi penyimpanan air tanah dan lain sebagainya. Namun demikian tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena tidak adanya sumber pekerjaan lain yang bisa menghadapi yang seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan pekerjaan namun belum mampu dengan terbatasnya anggaran. Khususnya di Kalimantan Timur upaya pemerintah untuk merehabilitasi dan menghutankan kembali lahan-lahan kosong belum dapat melampaui kecepatan kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan kayu, perladangan berpindah, maupun kerusakan lainnya yang timbul karena terjadinya kebakaran hutan atau kerusakan yang terjadi secara alami.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, tidak cukup Departemen Kehutanan saja yang menangani, namun usaha integrasi berbagai departemen sangat diperlukan. Hendaknya penanganan tersebut tetap memperhatikan aspek-aspek nilai hutan bagi masyarakat setempat, sikap masyarakat setempat terhadap hutan dan pengembangannya dan partisipasinya di dalam pengembangan serta keuntungan dari pengembangan tersebut bagi masyarakat. Hal-hal

ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan hutan. (Sukanto Reksohadiprodjo, 1993).

Perlu diketahui bahwa pada awal HPH Bina Desa Hutan yang mulai di programkan pemerintah sejak tahun 1992, cenderung diarahkan kepada sektor pertanian. Hal ini dimaksudkan karena pertanian merupakan sumber utama penyedia kesempatan kerja dan mata pencaharian. Semakin terkebelakang sebuah perekonomian semakin miskin dalam suatu negara atau daerah, maka semakin tergantung pula perekonomian mereka pada sektor pertanian. Suatu daerah dengan pertaniannya buruk tidak dapat menopang penduduknya terutama yang berjumlah besar. Akhirnya daerah tersebut akan tetap miskin karena hanya pada batas kemampuannya dapat menopang penduduk yang ada.

Oleh karena itu salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani di dalam dan disekitar areal HPH adalah dengan mengupayakan merubah kebiasaan mereka dari sistim berladang berpindah ke arah sistem pertanian menetap dengan melalui penyuluhan dan pembinaan selanjutnya secara intensif.

C. Pola Usaha Tani.

Daerah Kalimantan Timur dengan hutan tropika basah yang dimilikinya pada umumnya tumbuh di atas tanah podsolik merah kuning yang sangat miskin hara, sehingga apabila dikonversi menjadi lahan pertanian hanya dapat bertahan dua sampai tiga kali

panen dan setelah itu pemupukan dan pengelolaan yang intensif perlu dilakukan.

Polah usaha tani yang dipraktekkan masyarakat Kalimantan Timur selama ini sebagian besar dalam bentuk pertanian subsisten yang paling sederhana atau penggarapan lahan secara berpindah-pindah dari lahan yang telah menjadi tandus ke lahan baru yang masih subur. Pemanfaatan lahan subur diperolehnya dengan cara menebang pohon-pohon hutan kemudian membakarnya untuk dijadikan lahan pertanian baru dan meninggalkan lahan lama yang telah menjadi tandus. Kegiatan-kegiatan pemegang HPH, pencurian kayu atau penebang liar dalam skala besar, perladangan berpindah-pindah, tempat pemukiman baru, lokasih industri baru, kebakaran hutan dan kerusakan hutan yang terjadi secara alami adalah merupakan faktor utama yang menyebabkan hutan di daerah ini menjadi gundul.

Untuk mengantisipasi agar hutan tropika basah tetap lestasi maka upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini adalah melalui kegiatan reboisasi baik yang dilaksanakan oleh proyek-proyek pemerintah, pemegang HPH, dan hutan masyarakat. Walaupun demikian kenyataan dilapangan masih dalam jumlah kecil bila dibandingkan dengan kerusakan hutan yang ada. Tempat pemukiman baru dan lokalisasi industri baru perlu adanya perencanaan tata ruang yang mantap agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan teratur. Bagi kegiatan perladangan berpindah-pindah diarahkan kepada sistim pertanian menetap baik melalui proyek-proyek pemerintah yang dalam hal ini ditangani oleh Kanwil Pertanian dan Dinas Pertanian maupun yang dikelola oleh pihak swasta seperti melalui kegiatan HPH Bina Desa Hutan.

Kemudian untuk mendorong para petani dalam meningkatkan produktivitas mereka khususnya yang dikelola oleh pihak swasta melalui HPH Bina Desa Hutan, maka perlu adanya perhatian khusus oleh pemegang HPH dalam ikut serta menanamkan modalnya dan mempunyai pengaruh penciptaan produktivitas tinggi terhadap pertanian dengan cara :

1. Menaikkan kapasitas, berupa tempat percobaan pertanian untuk menanamkan pengetahuan teknik baru yang terkait dengan budidaya dan biologi pertanian.
2. Mengembangkan melalui sektor industri yakni input teknik baru baik yang berupa input kimiawi maupun input mekanis.
3. Memperbesar kapasitas para petani untuk menggunakan input pertanian secara efektif yang dilaksanakan melalui program pendidikan dan program pengarahan. (Gerardo P. Sicat, 1991).

Dari uraian di atas, lebih lanjut Gerardo P. Sicat dan H.W. Arndt menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penentu output di bidang pertanian yang antara lain :

- (1). Lahan,
- (2). Tenaga kerja,
- (3). modal (termasuk juga perbaikan mutu lahan seperti waduk, penterasan, dan mesin),
- (4). Air,
- (5). Input kimia seperti pupuk dan pestisida; dan banyak faktor lainnya seperti tenaga penyuluh lapangan dari berbagai badan pemerintah dan penelitian serta penyebar luasan pengetahuan.

Oleh karena itu dengan adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memprogramkan ke arah yang lebih menguntungkan pertanian dan penanaman modal untuk penyediaan prasarana pedesaan akan mempunyai arti yang sangat penting. Sebagai contoh membuat jalan pedesaan, pengendalian air dan proyek-proyek irigasi untuk kepentingan pertanian. Juga Lembaga-lembaga pedesaan yang

melayani para petani sangat penting dalam pemasaran hasil pertanian para petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

D. Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Dalam upaya melakukan pembinaan masyarakat pedesaan terutama yang tinggal di dalam dan sekitar HPH, maka untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang tangguh bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, melainkan juga diharapkan menjadi asset perusahaan yang sangat penting di masa datang.

Pengaruh-pengaruh terhadap diri seseorang untuk lebih berusaha meningkatkan prestasi kerjanya, oleh Gerardo P. Sicat dan H.W. Arndt dijelaskan sebagai berikut :

1. Mendidik atau memberi pengetahuan khusus dan keterampilan untuk berpikir umum. Pengalaman pendidikan memberi dasar bagi proses belajar lebih lanjut jika kemampuan umum berpikir dan belajar sudah tertanam. Keterampilan khusus seperti keterampilan yang cara pengalihannya melalui latihan sambil bekerja, latihan keahlian dan bentuk-bentuk pendidikan lainnya, dapat lebih mudah dipelajari sesudah kemampuan bernalar terbentuk.
2. Pendidikan itu mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kepercayaan dan penilaian serta sikap terhadap kerja dan tanggung jawab sosial seseorang. Orang yang lebih terdidik sering lebih dapat menanggapi gagasan baru dan persaingan, dan siap menerima disiplin yang ketat. Pengaruh yang lain adalah menumbuhkan toleransi, kepercayaan diri, dan tanggung jawab sosial serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan kehadiran para ilmiawan dan teknologi akan dituntut kearah terbentuknya masyarakat yang berdaya cipta dan kemampuan melakukan penyesuai-

an. Bila dikaitkan dengan investasi dalam bentuk modal fisik, kenyataan bahwa modal fisik tersebut baru dapat berguna sejauh orang dapat bekerja dan mengelolanya secara tepat dan mampu menggunakan modal fisik tersebut. Jadi kesemuanya itu (penggunaan modal fisik) akan tergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Modal fisik dan sumber daya alam pada hakekatnya adalah pasif dan modal sumber daya manusia yang aktif. Ini berarti bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat dipandang sebagai investasi dalam bentuk modal manusia. Pembangunan masyarakat atau pembangunan manusia seutuhnya yang dilakukan berbagai pihak berarti ikut mengambil bagian dalam menunjang program pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Pembangunan berkelanjutan harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1). Keikutsertaan semua anggota masyarakat (rakyat) dalam setiap tahap pembangunan. Kriteria ini diharapkan bahwa setiap anggota masyarakat harus mendapatkan kesempatan berusaha sesuai bidang dan kemampuannya masing-masing.
- 2). Setiap anggota masyarakat harus mendapatkan imbalan sesuai dengan pengorbanannya, artinya yang menghasilkan adalah juga yang menikmati dan mendapatkan manfaat sesuai dengan kemampuannya dalam menghasilkan.
- 3). Adanya tenggang rasa diantara anggota masyarakat yang berarti selalu menjaga keseimbangan antara yang kuat dan lemah dan yang kaya dengan yang miskin yang dicerminkan dalam rasa kebersamaan. Dengan demikian adanya kontrol sosial dari setiap anggota masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, merupakan kondisi tercapainya pembangunan yang berlanjut tersebut.
(Gunawan Sumodiningrat, 1990).

E. Program HPH Bina Desa Hutan.

Adapun upaya peningkatan pelaksanaan pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan secara berencana, terarah dan terkendali telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 691/Kpts-II/91, tertanggal 10 Oktober 1991, tentang Peranan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dalam Pembinaan Masyarakat di dalam dan disekitar Hutan. Sasaran utama dari surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peranan pemegang HPH dalam pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan, termasuk peladang berpindah dan perambah hutan.
2. Terlaksananya kegiatan "HPH Bina Desa Hutan" secara lebih terarah, terprogram dan tertip.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas pengertian masyarakat, pembinaan masyarakat dan HPH Bina Desa Hutan, juga telah dijelaskan dalam Surat Keputusan Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan No. 14/Kpts/V/1992, tertanggal 17 Maret 1992 sebagai berikut :

1. Masyarakat di dalam dan disekitar hutan adalah kelompok-kelompok masyarakat baik yang berada di dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan.
2. Pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan adalah upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar hutan.
3. HPH. Bina Desa Hutan adalah peran serta pemegang HPH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar hutan meliputi aspek-aspek pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana

umum, sosial budaya serta pelestarian sumber daya alam hutan dan lingkungan.

Selanjutnya yang menjadi ruang lingkup kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar HPH antara lain meliputi aspek-aspek :

1. Pertanian menetap
2. Peningkatat ekonomi
3. Pengembangan sarana dan prasarana umum
4. Sosial budaya
5. Pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

Sedangkan prioritas pembinaan terhadap masyarakat di dalam dan disekitar HPH tersebut antara lain :

1. Kelompok masyarakat di dalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan.
2. Kelompok masyarakat yang berbatasan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan.
3. Kelompok masyarakat dan/atau masyarakat pedesaan yang terdekat dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan.

Khusus mengenai pengertian HPH Bina Desa Hutan itu sendiri seperti yang telah dituangkan dalam SK. Dirjen Pengusahaan Hutan No. 170/KPTS/IV-PHH/1992, tentang Pedoman Pembinaan terhadap Pemegang HPH dalam rangka pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan, ter-tanggal 23 Januari 1992, sebagai berikut :

1. HPH Bina Desa Hutan adalah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemegang HPH untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar hutan yang antara lain meliputi

aspek-aspek pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana umum, sosial budaya, serta pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.

2. Studi diagnostik adalah kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh potensi, kondisi, aspirasi dan tata nilai masyarakat serta sumber dan tata nilai masyarakat serta sumber daya alamnya, serta berbagai alternatif kegiatan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Umum "HPH Bina Desa Hutan".
3. Rencana umum HPH Bina Desa Hutan untuk seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang dimasukkan kedalam/merupakan bagian dari Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Karya Lima Tahun "HPH Bina Desa Hutan".
4. Rencana Karya Lima Tahun "HPH Bina Desa Hutan" adalah rencana pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan selama lima tahun yang dimasukkan ke dalam/merupakan bagian dari Rencana Karya Lima Tahun (RKL) HPH dan digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Karya Tahunan "HPH Bina Desa Hutan".
5. Rencana Karya Tahunan "HPH Bina Desa Hutan" adalah rencana pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan yang dimasukkan ke dalam / merupakan bagian dari Rencana Karya Tahunan (RKT) HPH yang bersangkutan.

Kemudian sasaran dari pada HPH Bina Desa Hutan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya pendapatan, terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta timbulnya ekonomi pesedaan yang berwawasan lingkungan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai.
3. Terciptanya kesadaran dan perilaku positif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat meningkatkan perlindungan hutan secara swakarsa dan pengendalian perladangan berpindah.

Bila pengertian tersebut di atas direnungkan, maka demikian pula halnya bagi penduduk desa yang bermukim di dalam dan disekitar HPH. Kebijakan pemerintah untuk mengikut sertakan pemegang HPH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang tinggal di dalam dan disekitar HPH yang dikelolanya adalah wajar untuk melindungi yang lemah agar keharmonisan kedua

kelompok yang hidup berdampingan tetap terjalin baik.

Penyediaan lapangan pekerjaan di perusahaan, bantuan baik fisik maupun non-fisik dan pembinaannya seperti melalui HPH Bina Desa Hutan, pendidikan baik formal maupun non-formal (keterampilan), bekerja sama dengan masyarakat pedesaan mengaktifkan lembaga-lembaga ekonomi yang ada, sosial budaya, olah raga, pengkaderan Karang Taruna dan lain-lain yang sifatnya bantuan kemanusiaan kesemuanya ini merupakan partisipasi aktif perusahaan dalam ikut ambil bagian mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pelita V yang menyangkut keberadaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan adalah bahwa masyarakat disekitar hutan merupakan unsur yang amat penting dalam upaya pelestarian hutan dan pengembangan manfaat hutan.

Selanjutnya pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada baik di dalam dan disekitar hutan termasuk peladang berpindah (Kebijaksanaan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi lahan dalam Pelita V).

Hal ini berarti bahwa dengan melakukan upaya peningkatan prestasi kerja para petani dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalam dan disekitar hutan perlu mempertahankan kelestarian hutan, melalui peran serta pengusaha HPH secara terpola dan dalam pelaksanaannya dapat dimulai dengan melalui HPH Bina Desa Hutan yang berpedoman kepada petunjuk teknis yang ada. Dalam hal pedoman pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan, telah dituangkan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor 14/Kpts/V/1992, tanggal 17 Maret 1992 sebagai berikut :

A). Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi.

Organisasi kegiatan "HPH Bina Desa Hutan" ditangani oleh organisasi tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada pemegang HPH dan pemegang HPH menetapkan petugas/personil yang khusus menangani "HPH Bina Desa Hutan".

Pemegang HPH mengikutsertakan petugas dan masyarakat dalam pendidikan atau latihan "HPH Bina Desa Hutan". Pelaksanaan kegiatannya dibantu serta dibina oleh Instansi terkait sedang Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan sebagai penanggung jawab.

2. Tata Kerja.

a. Penanggung jawab.

- 1). Penanggung jawab adalah Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.
- 2). Kantor Wilayah Departemen Kehutanan bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian dalam rangka penyelenggaraan "HPH Bina Desa Hutan" di wilayahnya.
- 3). Bertugas mengkoordinasikan dan mensinkronkan seluruh rangkaian kegiatan "HPH Bina Desa Hutan".

b. Pelaksana adalah Pemegang HPH.

B). Pelaksanaan Pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan HPH Bina Desa Hutan pada prinsipnya didasarkan pada lingkup kegiatan HPH Bina Desa Hutan yang mencakup dua pola yaitu :

1. Pola Agraris, meliputi aspek-aspek :

a. Pertanian menetap.

1). Pembinaan teknis Usaha Tani Lahan Kering menyangkut:

1).a. Pembinaan teknis budidaya usaha tani

1).b. Pembinaan teknis budidaya tanaman Industri

1).c. Pembinaan teknis budidaya Holtikultura

1).d. Pembinaan teknis budidaya hutan Kemasyarakatan

1).e. Pembinaan teknis budidaya Peternakan.

2). Pembinaan teknis Usahatani Lahan Basah yang menyangkut:

2).a. Pembinaan teknis budidaya persawahan

2).b. Pembinaan teknis budidaya perikanan

2).c. Pembinaan teknis pencetakan sawah dan pembuatan dam/irigasi.

b. Kegiatan Pembinaan pertanian menetap di lakukan melalui:

1). Pembinaan teknis penyuluhan

2). Pembentukan Kader Usahatani menetap (Kanitap)

3). Penciptaan prakondisi/pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi :

- Petugas HPH Bina Desa Hutan yang akan ditempatkan pada lokasi binaan.

- Petugas penyuluh lapangan kehutanan yang akan ditempatkan pada pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan.

- Kader Usahatani menetap (Kanitap) sekaligus menjadi toko panutan, penggerak dan pelapor dalam usahatani menetap.

c. Pembinaan pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

1). Kegiatan pembinaan pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan meliputi :

a).1. Pembinaan teknis penghijauan

b).2. Pembinaan teknis konservasi sumber daya alam

c).3. Pembinaan teknis pengembangan hutan kemasyarakatan.

2). Kegiatan pembinaan pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan dilakukan meliputi :

a).1. Bimbingan teknis dan penyuluhan

b).2. Pendidikan dan pelatihan

c).3. Pengadaan Sarana dan prasarana

d).4. Percontohan.

2. Pola Non Agraris.

a. Pembinaan peningkatan ekonomi.

1). Pembinaan peningkatan ekonomi masyarakat :

1).a. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam penggolongan hutan.

1).b. Pembinaan pengembangan usahatani industri pedesaan.

1).c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi.

2). Kegiatan peningkatan ekonomi dilakukan melalui :

2).a. Bimbingan teknis dan penyuluhan

2).b. Pelatihan

- 2).c. Pengadaan sarana dan prasarana
- 2).d. Mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi seperti (KUD, Bank Unit Desa dan pasar)
- 2).e. Mendorong dan membantu pemasaran.

b. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana umum.

- 1). Kegiatan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana umum meliputi :

1).a. Pembinaan teknis pembuatan atau peningkatan sarana dan prasarana desa.

1).b. Pembinaan teknis pembuatan atau peningkatan jalan, jembatan, pemukiman, air bersih, pengairan, listrik/penerangan pedesaan dan lain-lain.

- 2). Kegiatan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana umum dilakukan melalui :

2).a. Bimbingan teknis dan penyuluhan

2).b. Pendidikan dan pelatihan

2).c. Pengadaan sarana dan prasarana umum

2).d. Percontohan.

c. Pembinaan sosial budaya.

- 1). Pembinaan sosial budaya menyangkut :

1).a. Pengadaan dan atau peningkatan sarana dan prasarana keagamaan/peribadatan, olah raga/kesenian, kesehatan dan pendidikan.

- 1).b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan atau latihan.
- 1).c. Pembinaan agama/mental spritual
- 1).d. Pembinaan kebudayaan
- 1).e. Pembinaan kelembagaan desa
- 1).f. Pembinaan organisasi masyarakat (kelompok).

2). Kegiatan pembinaan sosial budaya dilakukan melalui :

- 2).a. Bimbingan teknis dan penyuluhan
- 2).b. Pendidikan dan pelatihan
- 2).c. Pengadaan sarana dan prasarana
- 2).d. Percontohan.

C). Pengendalian dan Pengawasan.

1. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan "HPH Bina Desa Hutan".
2. Dinas Kehutanan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan "HPH Bina Desa Hutan".
3. Instansi terkait melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan yang berhubungan dengan tugas, fungsi dan kegiatan masing-masing instansinya.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum untuk ingin mengetahui kepedulian pemegang HPH terhadap lingkungan sosial dalam upaya ikut serta meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalam dan disekitar HPH yang dikelolanya. Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya tenaga kerja lokal dan non lokal yang bekerja pada PT. Oceanias Timber Products.

Tenaga lokal yang dimaksud tersebut meliputi :

- a. Tenaga kerja lokal yang berada di dalam dan disekitar HPH atau sepanjang perbatasan PT. Oceanias Timber Products yang terdiri dari Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Muara Wahau.
 - b. Tenaga kerja lokal yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Kutai dan dari luar daerah Kabupaten Kutai (non-lokal).
 - c. Jabatan yang dipercayakan pada tenaga kerja lokal dan non-lokal.
2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana PT. Oceanias Timber Products dapat memanfaatkan hasil produksi pertanian penduduk setempat serta hasil usaha lainnya yang dihasilkan oleh penduduk yang ada di dalam dan disekitar HPH yang dikelolanya.
 3. Untuk mengetahui besarnya bantuan PT. Oceanias Timber Products terhadap pembangunan Desa yang ada di dalam dan disekitar HPH.

4. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan HPH Bina Desa yang telah dilakukan oleh PT. Oceanias Timber Products terhadap desa binaannya sesuai dengan Pedoman terhadap Pemegang HPH dalam rangka pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (SK.Dirjen Pengusahaan Hutan No.170/KPTS /IV-PHH/1992).

B. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan akan dapat membawa manfaat-manfaat yang meliputi :

1. Dengan melalui HPH Bina Desa Hutan, diharapkan akan dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya cipta dan berhasil guna.
2. Pembinaan melakukan pola usaha tani menetap bagi penduduk desa berarti kegiatan merambah hutan dapat dihindari.
3. Kesuksesan HPH Bina Desa Hutan khususnya di areal HPH PT. Oceanias Timber Products berarti merupakan tindakan obyektif Pemegang HPH untuk peduli membantu masyarakat pedesaan atau mengentaskan kemiskinan di daerah binaannya. Ini berarti ikut membantu program pemerintah dalam melaksanakan pembagunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Dapat menjadi sumber informasi bagi PT. Oceanias Timber Products dalam pengambilan keputusan pembinaan selanjutnya.

BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional.

Untuk menyatakan pendapat tentang berbagai indikator dari variabel-variabel yang akan digunakan dan menerangkan konsep-konsep dalam penelitian ini diperlukan definisi operasional. Hal ini dimaksudkan agar jangan terjadi kesalah pahaman antara penulis dan pembacanya. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepedulian pemegang HPH adalah perhatian atau tindakan oleh pemegang HPH dalam membantu, membina dan memberikan sesuatu yang bermanfaat.
- b. Pemegang HPH adalah pengusaha yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola hutan pada suatu kawasan tertentu.
- c. HPH Bina Desa Hutan adalah peran serta pemegang HPH dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar hutan yang meliputi aspek pertanian dan non-aspek pertanian.
- d. Mengentaskan kemiskinan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengangkat derajat masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar HPH menjadi masyarakat sejahtera.
- e. Masyarakat di dalam dan disekitar HPH adalah kelompok manusia yang ada di dalam dan disekitar hutan areal kerja pemegang HPH.
- f. Kabupaten Kutai adalah nama satu Kabupaten di Kalimantan Timur.

g. PT. Ocean Timber Products adalah nama satu perusahaan pemegang HPH di Kabupaten Kutai.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

PT. Oceanias Timber Products merupakan salah satu pengelola HPH yang berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong (Sungai Kelinjau), Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur. Dipilihnya areal HPH ini sebagai obyek penelitian karena disekitar areal HPH tersebut cukup jauh di pedalaman dan banyak dijumpai desa miskin. Desa-desa yang ada di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products yang sekaligus menjadi Desa binaannya adalah Desa Long Nah (Dusun Muara Dun, Dusun Gemar Baru), Desa Melan dan Desa Long Pejeng.

Kemudian jangka waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah selama 10 (sepuluh) bulan. Perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Persiapan	: 1,5 bulan
b. Pengumpulan data	: 4 bulan
c. Analisis data	: 2,5 bulan
d. Penyusunan Laporan	: 1,5 bulan
e. Penjilidan dan penyerahan laporan	: 0,5 bulan (2 minggu)
<hr/>	
Jumlah	: 10 bulan

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 2 macam sebagai berikut :

- a. Data primer. Pada tahap awal dilakukan pengamatan di lapangan kemudian mengadakan wawancara langsung dan juga menyediakan kuesioner untuk diisi oleh para responden yang dijadikan sebagai sampel di beberapa Desa binaan PT. Oceanias Timber Products. Desa-desanya binaan yang dimaksud tersebut antara lain Desa Long Nah (Dusun Muara Dun Dusun Gemar Baru) Desa Melan, dan Desa Long Pejeng.

Kemudian data-data primer yang berhasil dikumpulkan tersebut meliputi jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta Bina Desa dari beberapa Desa di dalam dan disekitar areal HPH PT. Oceanias Timber Products. Untuk data lainnya yang dikumpulkan antara lain tanggapan-tanggapan masyarakat Desa dengan hadirnya HPH ditengah-tengah mereka, jumlah tenaga kerja lokal dan non lokal yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada PT. Oceanias Timber Products, jenis dan besarnya bantuan pemegang HPH terhadap masyarakat binaan di dalam dan diluar HPH, tingkat pendidikan masyarakat desa, dan potensi sumber daya yang ada yang memungkinkan untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

- b. Data Sekunder. Untuk melengkapi data-data primer tersebut di atas juga diambil data sekunder dari beberapa sumber yang dianggap perlu seperti buku-buku literatur, tulisan-tulisan ilmiah atau makala, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah tentang petunjuk teknis pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan, laporan-laporan pemerintah dan laporan perusahaan, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lainnya yang dianggap ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Analisis data.

Data yang dikumpulkan disusun secara sistimatis untuk mempermudah perhitungan, penyusunan tabel yang akan bermanfaat untuk keperluan interpretasi hasil penelitian dan penarikan kesimpulan serta saran.

Selanjutnya dasar analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif adalah dasar analisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk ingin mengetahui secara nyata hal-hal yang terjadi di lapangan.

Yang akan dihitung dan dianalisis dalam penelitian ini antara lain :

1. Gambaran umum HPH PT.Oceanias Timber Products dan potensi hutan yang terkandung di dalamnya.
2. Perbandingan antara pemanfaatan tenaga kerja lokal dan non lokal pada PT. Oceanias Timber Products yang dinyatakan dalam persentase (%).
3. Tingkat pendidikan Tenaga Kerja PT. Oceanias Timber

perpustakaan), kesehatan (penyediaan tenaga medis, penyuluhan kesehatan/KB), olah raga dan kesenian (sarana olah raga, pembinaan kesenian, sarana kesenian), pengembangan kelembagaan (pembinaan PKK dan Karang Taruna, pembenahan administrasi desa) dan lain-lain.

- (5). Pelestarian Sumber Daya Hutan dan Lingkungan. Kegiatan ini meliputi, penyuluhan kehutanan dan lingkungan, Reboisasi, penghijauan, pelestarian plasma nutfah lokal dan pembuatan hutan rakyat dan lain-lain.
- (6). Biaya Umum. Kegiatan ini meliputi, Administrasi, honorarium petugas, pengawasan dan lain-lain.

Hingga saat ini belum ada ketentuan resmi dari pemerintah tentang berapa persen (%) dari keuntungan perusahaan yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan setiap tahunnya walaupun hal ini merupakan salah satu yang diwajibkan kepada setiap pemegang HPH. Untuk menetralsisir permasalahan di atas perlu dikutip seperti yang pernah diasumsikan oleh Menteri Kehutanan bahwa dapat dibayangkan berapa besarnya dana yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat pedesaan melalui kegiatan HPH Bina Desa Hutan andaikata setiap pemegang HPH mengalokasikan dananya sebesar 2 % saja dari keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya.

Untuk mengetahui perkembangan perolehan laba PT. Oceanias Timber Products dari tahun ke tahun sejak diprogramkannya HPH Bina Desa Hutan sejak tahun 1991/1992 - 1993/1994 maka dapat dilihat pada table 5.13 sebagai berikut :

Tabel 5.13. Rangkuman Neraca Perbandingan dan Kondisi Kesehatan PT.Oceanias Timber Products, Periode Tahun 1991-1993.

Uraian	Neraca 1991 (Rp.)	Neraca 1992 (Rp.)	Neraca 1993 (Rp.)
Aktiva Lancar	6.523.928.072	9.619.579.151	9.915.065.779
Pasiva Lancar	5.571.881.337	7.846.515.521	5.593.088.527
Total Aktiva	18.939.734.228	20.904.243.717	20.635.347.064
Total Hutang	12.013.266.235	13.023.792.262	11.616.466.061
Penjualan	16.942.516.813	20.020.162.135	25.781.420.150
Laba sebelum pajak	493.306.543	941.076.598	1.964.011.859
Laba sesudah pajak	326.649.443	774.410.397	1.318.429.548
Kesehatan PT.OTP:			
- Likwiditas 1/2	1,17	1,23	1,77
- Solvabilitas 4/3	0,63	0,63	1,78
- Rentabilitas 7/5	0,02	0,04	0,05

- **). 1. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba lengkap perusahaan (Lihat lampiran 2 dan 3).
 2. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba perusahaan untuk tahun berakhir tanggal, 31 Desember 1994, masih sementara dalam proses audit di Jakarta.

Dari Tabel 5.13 di atas, analisis likwiditas perusahaan, dapat diketahui bahwa keadaan kesehatan perusahaan terutama pada tahun 1991 dan 1992 berada dalam keadaan yang cukup kritis. Liquiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban finansialnya disini seperti gaji staf/karyawan, pembelian dan pemeliharaan peralatan / bahan baku, cicilan kredit dan lain-lain yang sifatnya kewajiban jangka pendek. Dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar menunjukkan masing-masing 1,17 : 1 (1991), 1,23 : 1 (1992) dan 1,77 : 1 (1993). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi hutang lancar sebesar Rp. 1,- hanya dijamin oleh aktiva lancar masing-masing sebesar Rp. 1,17 (1991), Rp. 1,23 (1992) dan Rp. 1,77 (1993). Analisis ini biasanya digunakan

untuk prinsip hati-hati, karena bilamana pada tahun-tahun yang akan datang terjadi likwiditas perusahaan terutama seperti pada tahun 1991 dan 1992, kemudian alat-alat liquidnya mengalami kemacetan sebanyak 25 % saja, maka perusahaan akan kesulitan dana untuk memenuhi kewajibannya yang segerah harus diselesaikan.

Tingkat likwiditas (current ratio) suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan jalan :

- a). Dengan hutang lancar (current liabilities) tertentu, diusahakan untuk menambah aktiva lancar (current Assets).
- b). Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah hutang lancar.
- c). Dengan mengurangi jumlah hutang lancar bersama-sama dengan mengurangi Aktiva Lancar. (Bambang Riyanto, 1982).

Untuk analisis Solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansilnya bilamana perusahaan tersebut dilikwidasikan. Dengan memperbandingkan antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) menunjukkan hasil masing-masing ; 1 : 0,63 (1991), 1 : 0,63 (1992) dan 1 : 1,78 (1973). Seperti halnya dengan analisis liquiditas di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 1991 dan 1992, kesehatan perusahaan berada dalam keadaan insolvabel karena dengan terjadinya hutang sebesar Rp. 1,- hanya dapat dijamin oleh kekayaan masing-masing Rp. 0,63 (1991), Rp. 0,63 (1992), namun pada tahun 1993 mulai membaik kembali. Bilamana keadaan solvabilitas perusahaan seperti yang terjadi pada tahun 1993 tetap dipertahankan atau bila perlu ditingkatkan lagi, maka kondisi perusahaan akan lebih stabil.

Tingkat Solvabilitas dapat dipertinggi dengan jalan :

- a. Menambah aktiva tanpa menambah hutang atau menambah aktiva relatif lebih besar daripada tambahan hutang.
 - b. Mengurangi hutang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi hutang relatif lebih besar daripada berkurangnya aktiva.
- (Bambang Riyanto, 1982).

Selanjutnya bila ditinjau dari segi analisis rentabilitas, bilamana dibandingkan antara laba yang dicapai perusahaan dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut cukup kecil, terutama pada tahun 1991 dan tahun 1992. Perlu diketahui bahwa biasanya bagi perusahaan, rentabilitas yang tinggi lebih penting dari pada sekedar mendapatkan laba, karena laba yang besarpun tidaklah menjadi ukuran bahwa perusahaan telah bekerja secara efisien. Yang paling penting adalah perlunya meningkatkan perputaran aktiva usaha yang memungkinkan dapat memberi manfaat atau perolehan laba yang lebih besar terhadap perusahaan.

Dari analisa ratio keuangan PT. Oceanias Timber Products tersebut di atas, bahwa dari segi liquiditas maupun solvabilitas perusahaan terutama seperti yang terjadi pada tahun 1991 dan 1992 dapat diketahui bahwa kesehatan perusahaan berada dalam kondisi yang cukup kritis. Walaupun demikian sampai sejauh manakah perhatian atau kepedulian perusahaan terhadap pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalam dan disekitar HPH yang dikelolanya ?.

Kemudian seperti pada Tabel 5.13 di atas, bila ingin diketahui sampai sejauh mana perhatian atau kepedulian PT. Oceanias Timber Products tentang pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang dicapai perusahaan setiap tahunnya, maka dapat dilihat pada Tabel 5.14 sebagai berikut :

Tabel 5.14. Perbandingan antara laba sebelum pajak dengan realisasi anggaran pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan, PT. Oceanias Timber Products.

Tahun	Laba sebelum Pajak (Rp.)	Realisasi Anggaran HPH Bina Desa Hutan (Rp.)	(%)
1991	1.374.654.806,-	23.153.000,-	4,69
1992	941.076.598,-	69.190.000,-	7,35
1993	1.964.011.859,-	100.040.000,-	5,09
Rata-rata			5,82

*). Perhitungan Rugi Laba perusahaan tahun 1994, masih sementara dalam proses audit di Jakarta.

Pada Tabel 5.14, dapat diketahui bahwa dengan berpatokan pada jangka waktu selama 3 tahun yaitu sejak program HPH Bina Desa Hutan dimulai, 1991/1992 - 1993/1994, berarti jumlah dana yang dialokasikan oleh PT. Oceanias Timber Products setiap tahun untuk pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan rata-rata sebesar 5,82 % dari perolehan laba sebelum pajak atau sebesar 7,87 % dari laba sesudah pajak.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan persentase yang pernah diasumsikan oleh Menteri Kehutanan yaitu sebesar 2 % walaupun tidak baku, maka perhatian atau kepedulian PT. Oceanias Timber Products terhadap pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan yang dimaksud-

kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar HPH tergolong cukup tinggi.

Namun demikian, suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dengan memperhatikan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products masih di bawah garis kemiskinan bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan penduduk miskin di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu diharapkan agar perusahaan dapat meningkatkan kepeduliannya dalam rangka peningkatan pendapatan / kesejahteraan penduduk yang tinggal di dalam dan disekitar HPH yang dikelolanya. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan HPH Bina Desa Hutan, ketenaga kerjaan, pendidikan dan latihan, mengaktifkan lembaga-lembaga ekonomi yang ada untuk pemasaran produk-produk usaha penduduk misalnya melalui KUD, sehingga suatu ketika penduduk setempat diharapkan dapat hidup setarap dengan desa-desa lainnya yang telah maju.

B. Pembahasan.

a). Bidang Kehutanan.

Areal HPH PT. Oceanias Timber Products yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai, mempunyai luas 200.000 hektar (SK. HPH No. 238/KPTSUM/1993). Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa areal yang berhutan seluas 87.000 ha (93,50 %) dan areal tak berhutan seluas 13.000 ha (6,50 %).

Selama 22 tahun perusahaan ini beroperasi di areal HPH Sungai Kelinjau, dalam kegiatan eksploitasinya dapat memproduksi kayu bulat rata-rata sebesar 1.20.974,84 m³ per tahun dengan luas tebangan rata-rata 3.300,41 ha. Dalam perkembangannya rencana dan realisasi luas tebangan maupun produksi kayu bulat agak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan terutama pada tahun RKT 1991/1992 terjadi kebakaran hutan yang cukup besar dan menimpa sebagian besar areal HPH PT. Oceanias Timber Products sehingga sebagian besar pohon yang dapat dipungut ikut terbakar. Dengan matinya sebagian besar pohon masak tebang tersebut mengakibatkan produksi kayu bulat PT. Oceanias Timber Products menurun drastis bahkan hampir separuhnya dari produksi tahun sebelumnya. Penyebab lainnya adalah dengan munculnya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri untuk membatasi ekspor kayu bulat ke Luar Negeri dan mengharuskan Pemegang HPH mendirikan Industri Kayu dalam bentuk Industri Kayu Gergajian dan Industri Kayu Lapis sehingga kayu yang dapat diekspor adalah dalam bentuk kayu olahan. Pertimbangan pemerintah di sini tidak lain adalah untuk menjaga kelestarian hutan, walaupun tidak sedikit Pemegang HPH

yang harus gulung tikar sebagai akibat ketidak mampuannya mendirikan industri kayu tersebut. Pertimbangan lainnya dengan didirikannya industri kayu oleh Pemegang HPH tersebut adalah dimaksudkan untuk menggalakkan industri secara keseluruhan Dalam Negeri yang sekaligus dapat memberi nilai tambah lebih besar terhadap produksi ekspor kayu Indonesia ke Luar Negeri. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya industri kayu tersebut antara lain terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, para pekerja pribumi mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang pada akhirnya menuju kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas bila ditinjau dari segi ketenaga kerjaan hingga dilakukan penelitian ini jumlah karyawan pada PT. Oceanias Timber Products untuk HPH Sungai Kelinjau dan Sungai Marah sebanyak 517 orang. Dari ke 517 karyawan tersebut terdapat tenaga kerja lokal yang tinggal di dalam dan sekitar HPH sebanyak 167 orang atau sekitar 32,30 % dari jumlah tenaga kerja yang ada. Tenaga kerja lokal yang maksudkan disini adalah bukan hanya yang menjadi desa binaan perusahaan tetapi juga termasuk masyarakat yang tinggal disepanjang perbatasan HPH yang meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Wahau. Bila dilihat pada tingkat Kabupaten Kutai maka jumlah penduduk yang dapat bekerja diperusahaan ini adalah sebanyak 219 orang (42,36 %) dan pada tingkat Propinsi Kalimantan Timur sebanyak 283 orang (54,74 %). Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja pendatang dari luar Kalimantan Timur sebanyak 234 (45,26 %). Khusus untuk para pekerja lokal dalam menjalankan tugasnya sehari-hari masih berada pada tingkat jenis pekerjaan teknis dan

masih kurang menduduki posisi pada tingkat manajemen. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk di dalam dan sekitar HPH umumnya rendah sehingga sulit bersaing dengan pendatang yang sebagian besar tingkat pendidikannya lebih tinggi. Sesuai hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang lebih menonjol dikerjakan oleh penduduk lokal antara lain persemaian, penyiapan lahan, mengoperasikan logging truck, perakitan, penebang kayu dengan menggunakan Chain Saw, Agro forestry, pemungutan hasil dan pekerjaan teknis lainnya agak merata.

b). HPH Bina Desa Hutan.

Pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan sebagaimana yang diinstruksikan pemerintah kepada para pemegang HPH adalah dimaksudkan agar para pemilik modal tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalam dan sekitar HPH yang dikelolanya. Dalam kaitannya dengan HPH Bina Desa Hutan tersebut di atas sesuai dengan hasil penelitian ini, diketahui bahwa minat masyarakat desa khususnya yang bermukim di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products untuk mengikuti Program HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan oleh perusahaan pada prinsipnya di dapatkan tanggapan yang positif. Hasil perhitungan dalam penelitian ini dari 37 responden yang diwawancarai pada ketiga desa binaan PT. Oceanias Timber Products yaitu Desa Long Nah (Dusun Muara Dun dan Gemar Baru), Desa Melan dan Desa Long Pejeng, menunjukkan sekitar 97,30 % menyatakan "Senang" dengan hadirnya perusahaan ditengah-tengah mereka. Alasan mereka yang berhasil

dihimpun antara lain karena terbukanya kesempatan kerja di perusahaan, dapat membantu masyarakat baik dalam bentuk program fisik maupun program non-fisik, sedangkan 2,70 % menyatakan "Tidak senang" dengan alasan haknya tertindas atau tidak diabaikan perusahaan.

Mengenai kesediaan masyarakat menerima adanya HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan oleh PT. Oceanias Timber Products sekitar 75,68 % menyatakan "Senang" dengan alasan karena bisa mendapatkan bantuan berupa alat-alat pertanian sederhana, bibit, obat-obatan, dan pembinaan bertani menetap dari perusahaan. Sedangkan yang lainnya belum di dapatkan suatu jawaban yang pasti dengan alasan karena lokasi HPH Bina Desa Hutan cukup jauh dari tempat pemukiman mereka, dan sebagian kecil lagi merasa "Tidak senang" karena tidak terpenuhinya keinginan mereka dari perusahaan.

Ditinjau dari segi manfaat Bina Desa Hutan tersebut dengan usia pelaksanaannya yang masih muda yaitu 4 tahun atau setelah adanya instruksi dari pemerintah, tentu saja belum bisa dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat setempat mengingat program ini untuk jangka panjang. Tanggapan masyarakat tentang manfaat HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan PT. Oceanias Timber Products tersebut, menurut hasil perhitungan menunjukkan masing-masing, "Sangat bermanfaat" 5,41 %, "Bermanfaat" 13,51 %, "Cukup bermanfaat" 32,43 %, "Belum bermanfaat" 40,54 % dan "Tidak bermanfaat" 8,11 %.

Kemudian untuk mengetahui sampai sejauh mana kesesuaian keinginan masyarakat tentang pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan seperti yang telah dilaksanakan perusahaan tersebut, menurut hasil perhitungan menunjukkan masing-masing : "Sesuai dengan

keinginan masyarakat 35,14 %, Belum sesuai 54,05 % dan tidak sesuai 10,81 %.

Jadi dengan memperhatikan tanggapan-tanggapan masyarakat di dalam dan disekitar HPH tentang HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan oleh PT. Oceanias Timber Products tersebut di atas, secara global baik yang telah mengikuti maupun yang belum mengikutinya dengan memperhatikan beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka dapat dinyatakan positif.

Selama kurang lebih 4 tahun (1991/1992 - 1994/1995) pembiayaan pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan pada perusahaan ini dari jumlah anggaran sebesar Rp. 256.450.000,- yang direncanakan, telah direalisasikan sebesar Rp. 250.133.000 (97,54 %) dan Rp. 211.633.000,- sekitar 82,52 % diantaranya digunakan di Dusun Muara Dun (Desa Long Nah) sebagai pusat kegiatan HPH Bina Desa Hutan.

Kemudian dengan memperhatikan Laporan Rugi/Laba perusahaan untuk periode tahun berakhir 1991, 1992 dan 1993 sebagai patokan, (untuk tahun 1994 sementara dalam proses audit di Jakarta) dan membandingkan antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan realisasi anggaran pelaksanaan HPH Bina Desa yang dilakukan pada tahun yang sama, dapat diketahui bahwa dana yang dialokasikan PT. Oceanias Timber Products untuk kegiatan HPH Bina Desa Hutan rata-rata sebesar 5,82 % dari laba sebelum pajak atau sebesar 7,87 % dari laba sesudah pajak. Bila ingin dibandingkan dengan yang pernah diasumsikan Menteri Kehutanan yaitu sebesar 2 % dari keuntungan perusahaan, hal ini berarti bahwa perhatian atau kepedulian PT. Oceanias Timber Products terhadap pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di dalam dan disekitar HPH tergolong cukup tinggi.

Namun demikian hingga dilakukan penelitian ini kenyataan dilapangan bahwa jumlah masyarakat yang telah aktif mengikuti program HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan oleh perusahaan masih sangat kurang. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang tercantum dalam Laporan HPH Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products sebanyak 150 orang dari ketiga Desa binaan, walaupun masyarakat yang dapat mengikuti program tersebut secara intensif baru berjumlah 10 orang. Hal ini disebabkan oleh karena masih keterikatan masyarakat desa setempat ke sistem lama yang telah dilakukan secara turun temurun sejak dulu kala yaitu pola usaha tani berladang berpindah-pindah.

Perlu disadari bahwa untuk merubah kebiasaan masyarakat secara drastis dari sistim berladang berpindah-pindah ke arah pertanian menetap tidaklah begitu mudah, melainkan memerlukan proses pembinaan dalam jangka waktu yang lama dan bertahap. Kadang-kadang keraguan timbul bagi sebagian besar masyarakat untuk mengikuti program HPH Bina Desa tersebut karena belum terbiasa pada pola usaha tani lahan basah atau sawah dan masih terbatasnya alat-alat penunjang pertanian baik yang dimilikinya sendiri maupun yang disediakan oleh pemegang HPH.

Kemudian untuk menarik perhatian para peserta HPH Bina Desa Hutan, maka perlu adanya pencetakan kebun dan sawah percontohan oleh perusahaan yang didukung oleh sistim pemetakan sawah dan saluran irigasi yang cukup. Khusus untuk pencetakan sawah setelah ditunjang oleh aliran irigasi yang cukup maka perlu diterapkan suatu sistim yang dinamakan dengan istilah agrofisery yang mengkombinasikan antara tanaman padi sawah dengan budidaya ikan.

Sedangkan untuk ladang atau kebun percontohan perlunya diterapkan farm forestry dengan mengkombinasikan tanaman pangan, pohon buah dan tanaman kehutanan. Besarnya bantuan yang ditunjang dengan penyuluhan secara intensif khususnya dibidang pertanian adalah sebagai upaya langsung yang perlu dilakukan dalam rangka merangsang para petani untuk melaksanakan sistim pertanian menetap secara intensif dan kontinue dimasa datang. Apabila hal ini dapat memberikan hasil yang memuaskan maka tidak menutup kemungkinan bagi para petani lainnya untuk melakukan hal yang sama dikemudian hari.

Dengan demikian dalam upaya menggairahkan para petani meningkatkan produktivitas kerjanya untuk mencapai hasil-hasil pertanian secara optimal maka lembaga-lembaga ekonomi dalam masyarakat seperti KUD dan Koperasi perusahaan hendaknya difungsikan sebagai jembatan untuk membentuk kerja sama yang saling menunjang serta saling ketergantungan antara satu sama lain. Untuk mengoptimalkan pemasaran hasil-hasil pertanian dan produk-produk kerajinan masyarakat ke perusahaan perlu didiskusikan oleh kedua belah pihak seperti mencari hubungan dengan pihak luar sebagai potensi pasar yang baru agar hasil-hasil produk masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi.

c). Keberhasilan pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan.

PT. Oceanias Timber dalam pengelolaan hutannya terutama dalam pembinaan hutan, eksploitasi hasil-hasil hutan, pengembangan HTI, tetap berdasarkan pada Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang

telah disahkan oleh pemerintah yang meliputi :

- Rencana Karya Duapuluh Tahun (RKD);
- Rencana Karya Lima Tahun (RKL); dan
- Rencana Karya Tahunan (RKT).

Penentuan kriteria penilaian seperti tersebut di atas dalam penelitian ini akan didasarkan pada Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) tahap II PT. Oceanias Timber Products selama 20 tahun mendatang (Tahun 1993/1994 sampai dengan 2012/2013).

Seperti yang telah diuraikan dimuka bahwa hal-hal yang dapat dinilai untuk mengetahui berhasil tidaknya Pemegang HPH dalam pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan adalah dengan berpautan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 288/KPTS/IV-PHH/1992, tertanggal 7 Nopember 1992 meliputi; Laporan-laporan perusahaan yang belum dan telah disahkan oleh pemerintah yang dalam hal ini pada tingkat RKT oleh Kakanwil Kehutanan setempat dan RKL, RKPH, Studi Diagnostik oleh Dirjen PH. Hal lain yang sekaligus menjadi kunci keberhasilan adalah realisasi anggaran HPH Bina Desa Hutan, keterlibatan instansi terkait dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya, Ada organisasi, Ada Tenaga Khusus yang menanganinya (Tenaga teknis kehutanan Indonesia) dan pelaporannya secara teratur per periodik dan tepat waktu.

Sesuai dengan data yang diperoleh dalam kaitannya dengan laporan perusahaan tersebut adalah :

1. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) II (Bulan April 1993 sampai dengan Maret 2013) SUDAH DIBUAT DAN DIPERBAIKI (SK Dirjen PH No. 537/IV/PPH-2/1995, Tanggal 24 1995 untuk perbaikan), SEMENTARA DALAM PROSES PENGESAHAN DI JAKARTA.
2. Rencana Karya Lima Tahun I, periode 1993/1994 sampai dengan 1997/1998, SEMENTARA DALAM PROSES PENGESAHAN DIRJEN PH DI JAKARTA.
3. Rencana Karya Tahunan Tahun I, periode 1993/1994, SK. Kanwil Kehutanan Kaltim, No. 19/KPTS/KWL-Kaltim/PH-2/93, Tanggal 08 April 1993.
4. Rencana Karya Tahunan Tahun I, periode 1994/1995, SK. Kanwil Kehutanan Kaltim, No.46/KPTS/KWL-Kaltim/PH-2/I/93, Tanggal 29 April 1994.
5. Laporan Studi Diagnostik "HPH Bina Desa Hutan", telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pengusahaan Hutan No. 365/IV/PHH-2/94, tanggal 31 Januari 1994.

Untuk menunjang dari pada unsur-unsur yang dinilai seperti uraian di atas, perlu pula diperhatikan tentang faktor-faktor yang menjadi unsur penunjang lainnya. Yang dimaksud dengan unsur penunjang lainnya disini adalah dengan memperhatikan perkembangan dan potensi hutan yang ada, volume produksi, kesempatan kerja

bagi penduduk lokal dan non-lokal, tanggapan masyarakat setempat dengan adanya perusahaan dan pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan, keadaan kesehatan perusahaan terutama dilihat dari segi analisa liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas, kondisi daerah binaan, besarnya keuntungan perusahaan yang dapat dialokasikan kepada pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian disamping memperhatikan unsur-unsur yang dinilai seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, agar tidak mengaburkan persoalan yang sebenarnya maka perlu ditunjang oleh faktor-faktor lain sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Oleh karena itu melalui penelitian ini akan dicoba untuk diterapkan pada PT. Oceanias Timber Products dengan maksud untuk ingin mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan ini dalam mengelola HPH Bina Desa Hutan.

Sesuai dengan data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder, maka untuk penilaian tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

Penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan
HPH Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products.

1. Pra rencana (Studi diagnostik),	Nilai : 10
2. Rencana Umum RKPH,	Nilai : 2
3. Rencana Karya Lima Tahun (RKL),	Nilai : 3
4. Rencana Karya Tahunan (RKT I, II),	Nilai : 10
5. Realisasi dari rencana fisik dan biaya HPH Bina Desa Hutan > 85 % (realisasi 97,54 % dari rencana)	Nilai : 45
6. Keterlibatan masyarakat dan Instansi terkait yang dilibatkan hanya dalam pelaksanaannya,	Nilai : 5
7. Ada organisasi dan tenaga khusus yang menangani,	Nilai : 5
7. Pelaporan secara teratur per periodik dan tepat waktu,	Nilai : 10
	<hr/>
	JUMLAH: 90

Kriteria keberhasilan yang ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Nilai 0 - 50; : Kurang
2. Nilai > 50 - 80; : Sedang
3. Nilai > 80; : Baik.

Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa nilai yang dicapai oleh PT. Oceanias Timber Products adalah sebesar 90. Bila dibandingkan dengan kriteria keberhasilan seperti tersebut di atas maka untuk kasus PT. Oceanias Timber products karena nilai yang dicapai diatas 80 yaitu pada angka 90, berarti perusahaan ini dalam mengelola segala kegiatan HPHnya termasuk HPH Bina Desa Hutan dapat dikategorikan baik atau "Berhasil".

d). Keadaan Sosial ekonomi masyarakat.

Pada umumnya mata pencaharian pokok penduduk yang tinggal di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products adalah bertani. Pola usaha tani yang dikembangkan selama ini masih mengikuti kebiasaan leluhur mereka dengan cara berladang berpindah-pindah.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari 37 Kepala Keluarga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 149 jiwa sebagai sampel di ketiga desa binaan perusahaan yaitu Desa Long Nah, Desa Melan, dan Desa Long Pejeng, setelah dihitung menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk setempat baru mencapai sebesar Rp. 23.133,19/jiwa/bulan atau sekitar Rp. 277.598,28/jiwa/tahun. Perhitungan ini didasarkan pada tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat setempat.

Bila dilihat dari rata-rata pendapatan perkapita penduduk di ketiga desa binaan tersebut masih cukup memprihatinkan bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan penduduk miskin di

Kalimantan Timur. Pendapatan perkapita yang termasuk kategori miskin di Kalimantan Timur sesuai dengan angka Statistik pada tahun 1993 adalah untuk Kota sebesar 40.012,-/jiwa/bulan dan Desa sebesar Rp. 29.011/ jiwa/bulan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan penduduk di ketiga wilayah studi tersebut di atas yang antara lain :

1. Letak desa mereka yang terpencil.
2. Tingkat pendidikan masyarakatnya umumnya rendah yang menyebabkan kemampuan skill mereka sulit bersaing di pasaran kerja atau dengan para pendatang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi terutama untuk menduduki jabatan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi.
3. Masih kurangnya keterampilan khusus yang dimiliki penduduk sehingga sulit menciptakan substitusi pekerjaan lainnya untuk mendapatkan pendapatan tambahan diluar pekerjaan pokok yang ditekuninya.
4. Tingkat kemampuan manajemen yang dimilikinya cukup rendah yang menyebabkan selalu mempunyai pola pikir dengan sikap pesimis atau pasif dalam menerima informasi-informasi baru atau perkembangan-perkembangan baru yang dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa datang.
5. Pola usaha tani yang dikembangkan masih mengikuti sistim tradisional atau berladang berpindah (dengan corak subsisten).
6. Belum difungsikannya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat secara optimal seperti KUD dan lembaga ekonomi lainnya yang dapat digunakan sebagai jembatan untuk menunjang pemasaran hasil-hasil pertanian serta hasil-hasil usaha masyarakat lainnya

misalnya; peternakan, perikanan, ukiran patung dan produk-produk kerajinan masyarakat lainnya.

7. Terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang perekonomian desa untuk berkomunikasi dengan pihak luar.

Dari uraian di atas maka dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalam dan disekitar HPH perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan pertanian secara intensif, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal, mengaktifkan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat sebagai jembatan pemasaran produk-produk pertanian dan non-pertanian.

Sesuai dengan pengamatan di lapangan pada ketiga desa binaan PT. Oceanias Timber Products yaitu Desa Long Nah, Desa Melan dan Desa Long Pejeng secara fisik umumnya datar dan cukup potensial untuk dijadikan daerah pertanian menetap, terutama pada Desa Melan yang memungkinkan dapat dibuat saluran irigasi yang cukup memadai dari sungai sehingga cocok dijadikan sebagai daerah pertanian padi sawah.

Perlu diketahui pula bahwa penduduk di dalam dan sekitar HPH merupakan sumberdaya manusia yang cukup potensial bagi perusahaan dan sekaligus dapat menjadi asset perusahaan dimasa datang bila-mana dibina dengan baik.

Berpijak pada permasalahan di atas, maka perusahaan yang beroperasi disekitar penduduk setempat bukanlah untuk tujuan ekonomis belaka, melainkan perlu dipertimbangkan sampai sejauh mana dapat memberi manfaat terhadap masyarakat yang ada disekitarnya (intangibel benefit). Demikian pula sebaliknya dengan

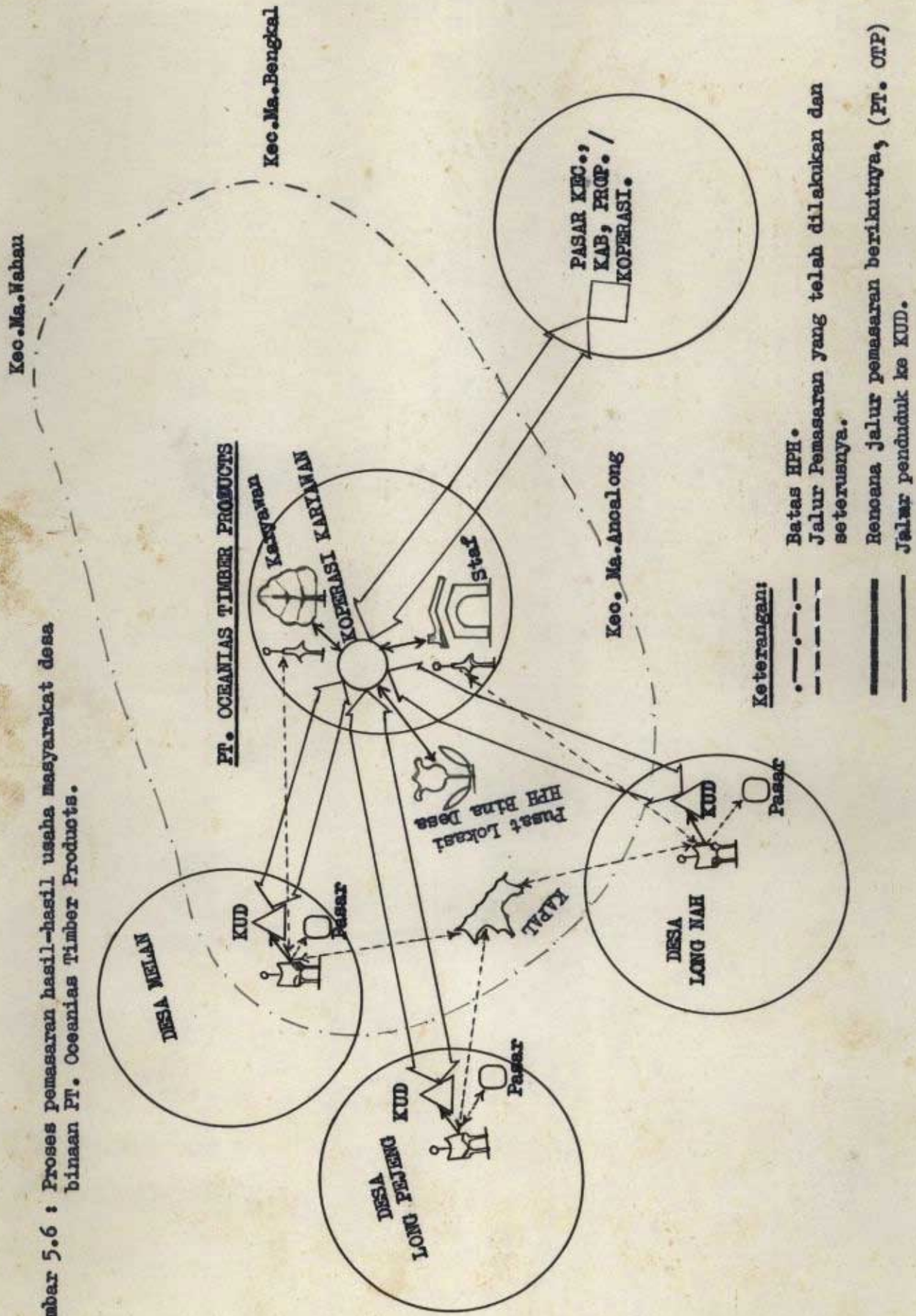
dilakukannya kerjasama antara perusahaan dan masyarakat baik ditinjau dari segi tenaga kerja, maupun produk-produk pertanian masyarakat yang dapat disuplai ke perusahaan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari mereka. Manfaat dari masyarakat tersebut tidak hanya dapat diukur dari segi ekonomisnya saja tetapi yang paling penting adalah dukungan keamanan untuk menghindari terjadinya perambah hutan yang lebih besar baik yang dilakukan secara sadar oleh individu dalam masyarakat maupun karena diperalat oleh para cukong.

Jadi pengelolaan usaha tani dengan input yang memadai diharapkan akan dapat memberikan hasil yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada 4 tipe lahan yang dapat diusahakan meliputi ladang, sawah dengan sekali palawija, tanaman keras (perkebunan) dan pekarangan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kesesuaian lahan yang cocok dikembangkan secara menetap di ketiga desa binaan dan sekaligus dikaitkan dengan konsep agroforestry. Selain itu perlu dilakukan pengkaderan bagi anggota masyarakat yang berbakat dengan melakukan pendidikan keterampilan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang memungkinkan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengolahan bahan baku tersebut seperti rotan yang dapat diciptakan menjadi anyam-anyaman, perabot-perabot rumah tangga misalnya kursi tamu, rak buku, lampit, gantungan pakaian, keranjang, dan untuk jenis kayu tertentu dapat dibuat menjadi ukiran kayu, patung dan lain-lain. Setelah tujuan tersebut di atas tercapai, maka langkah selanjutnya perlu diadakan kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan dalam hal pemasarannya dengan sistim Bapak angkat dan memfungsikan KUD dengan Koperasi perusahaan

sebagai jembatan untuk masuk keluarnya barang dan mengelola administrasi keuangan.

Adapun rencana jaringan kerja pemasaran produk-produk masyarakat seperti hasil-hasil pertanian, ternak, ikan, dan produk-produk kerajinan masyarakat ke PT. Oceanias Timber Products, dapat dilukiskan sebagai berikut :

Gambar 5.6 : Proses pemasaran hasil-hasil usaha masyarakat desa binaan PT. Oceania Timber Products.



Pada Gambar 5.6, di atas dapat dijelaskan disini bahwa untuk mengoptimalkan jaringan pemasaran hasil pertanian dan hasil usaha masyarakat lainnya, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan kerja sama yang baik atau memfungsikan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang ada seperti KUD dengan Koperasi Perusahaan. Pemasaran produk-produk masyarakat tersebut disalurkan melalui KUD untuk selanjutnya disuplai ke perusahaan melalui Koperasi Karyawan Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar KUD dapat lebih aktif dan dapat mensuplai produk-produk masyarakat dalam skala besar ke perusahaan setempat seperti PT. Oceanian Timber Products. Produk-produk masyarakat yang dimaksudkan tersebut terutama untuk bahan pangan. Sedangkan untuk hasil kerajinan tangan lainnya seperti patung, anyam-anyaman dan lain-lain disamping dapat dilakukan penjualan bebas kepada masyarakat dilingkungannya sendiri atau kepada pedagang keliling juga dapat diadakan kerjasama kepada perusahaan kemudian perusahaan mencarikan pasar misalnya ke Tenggara atau ke Samarinda. Jadi dengan adanya kerjasama tersebut sehingga pada akhirnya diharapkan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang sama. Dengan diperolehnya manfaat di kedua belah pihak berarti akan dapat memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam upaya mencapai penghasilan yang lebih tinggi.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari uraian seperti di muka, maka berikut ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang meliputi :

1. PT. Oceanias Timber Products yang berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong mempunyai luas areal 200.000 ha, yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 56.000 ha, Hutan produksi terbatas 74.500 ha dan Hutan yang dapat dikonversikan seluas 69.500 ha. Selama 22 tahun perusahaan ini beroperasi luas areal tebangan rata-rata 3.300,41 ha per tahun dan volume produksi kayu bulat yang dicapai rata-rata 120.974,86 meter kubik pertahun.

2. Dalam upaya menunjang program pemerintah dibidang penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat desa adalah merupakan salah satu cara Pemegang HPH untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama bagi yang tinggal di dalam dan disekitar perbatasan HPH yang dikelolanya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas khusus untuk PT. Oceanias Timber Products hingga selesainya penelitian ini telah mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 167 orang atau sekitar 32,30 % dari seluruh tenaga kerja yang ada (517 orang).

3. Ditinjau dari segi pendapatan perkapita masyarakat pada desa binaan yang tinggal di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products sesuai dengan sampel yang di ambil yaitu 37 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 149 jiwa, baru mencapai rata-rata sebesar Rp. 23.133,19/jiwa/bulan atau Rp.277.598,28/ jiwa/tahun. Menurut angka Statistik Propinsi Kalimantan Timur tentang rata-rata pendapatan per kapita penduduk miskin di daerah ini yaitu; Kota sebesar Rp. 40.012,- (Rp.480.144,- /jiwa/tahun) dan Desa sebesar Rp.29.011,-/jiwa/bulan atau Rp. 348.132./jiwa/tahun. Jika dibandingkan antara rata-rata pendapatan perkapita penduduk miskin untuk Desa di Kalimantan Timur berarti bahwa rata-rata pendapatan perkapita penduduk di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products masih berada di bawah garis kemiskinan.
4. Pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan pada PT. Oceanias Timber Products sesuai dengan hasil penelitian ini pada prinsipnya mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat setempat dengan skor sebesar 75,68 % menyatakan "Senang".
5. Menurut hasil penelitian bahwa pemasaran produk-produk usaha masyarakat selama ini ke PT. Oceanias Timber Products masih kurang atau belum optimal bila dibandingkan dengan kebutuhan karyawan perusahaan yang sebenarnya. Untuk itu diharapkan agar upaya lebih lanjut yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang tinggal di dalam dan disekitar HPH adalah meningkatkan kerjasama dengan

memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi yang ada misalnya KUD dan Koperasi perusahaan sebagai jembatan pemasaran produk-produk usaha masyarakat seperti hasil-hasil pertanian, ternak, ikan ke perusahaan dalam skala besar dan juga perlu membantu pemasaran produk-produk kerajinan masyarakat baik di dalam maupun di luar perusahaan.

6. Rencana anggaran HPH Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products untuk Desa Long Nah (Dusun Muara Dun dan Dusun Gemar Baru), Desa Melan, sejak tahun 1991/1992 - 1994/1995, secara keseluruhan berjumlah Rp. 256.450.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 250.133.000,-. Hal ini berarti bila dibandingkan antara jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan dengan realisasinya berarti sekitar 97,54 % telah dilaksanakan.
7. Dengan memperbandingkan antara realisasi anggaran HPH Bina Desa Hutan dengan laba sebelum pajak yang dicapai perusahaan (dasar -- Laporan Rugi/Laba perusahaan periode tahun 1991, 1992 dan 1993), maka keuntungan PT. Oceanias Timber Products yang dapat dialokasikan terhadap pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan rata-rata sebesar 4,71 % per tahun.
8. Sesuai dengan SK. Dirjen PH No. 288/KPTS/IV-PHH/1992, tanggal 7 November 1992, tentang kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan telah ditetapkan skor masing-masing; Nilai 0 - 50 (Kurang), Nilai 50 - 80 (Sedang) dan Nilai > 80 (Baik).

Dari kriteria penilaian di atas khusus untuk PT. Oceanias Timber Products dengan memperhatikan Laporan Diagnostik, RKPH, RKL, RKT, Realisasi dari rencana fisik dan biaya pelaksanaannya, Keterlibatan masyarakat dan instansi terkait dalam perencanaan, Organisasi pelaksanaan dan Pelaporan, maka setelah diadakan perhitungan menunjukkan hasil sebesar 90 (Sembilan puluh). Dan karena hasil perhitungan di atas angka 80 (delapan puluh), berarti bahwa PT. Oceanias Timber Products dalam mengelola HPHnya, terutama dalam pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan adalah termasuk kategori "Baik".

9. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan bagi penduduk di dalam dan disekitar HPH, maka diharapkan agar perusahaan dapat meningkatkan perhatian dan memberikan urutan prioritas sesuai dengan kondisi desa atau kebutuhan masyarakat setempat khususnya yang menyangkut penyediaan lapangan pekerjaan, membantu dan membina masyarakat desa untuk program fisik seperti pertanian menetap yang ditunjang oleh saluran irigasi yang cukup, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga/pembi- naannya, sarana dan prasarana jalan, serta pembangunan non- fisik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengaktifkan lembaga ekonomi desa untuk pemasaran produk- produk masyarakat, membina program sosial dan budaya.

B. Saran-saran

Sesuai dengan uraian di atas, maka berikut ini diajukan beberapa saran antara lain :

1. Perlu ditingkatkannya pemanfaatan tenaga kerja lokal (penduduk yang tinggal di dalam dan disekitar HPH) untuk mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan serta menghindari terjadinya perambah hutan secara besar-besaran.
2. Perlunya upaya peningkatan pendidikan masyarakat baik formal maupun non-formal seperti pendidikan keterampilan diberbagai bidang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas menuju kearah usaha mandiri dikemudian hari.
3. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di dalam dan disekitar HPH, maka perlu adanya hubungan kerja sama yang baik antara perusahaan dengan masyarakat untuk memfungsikan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang ada seperti KUD dan Koperasi karyawan perusahaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pemasaran hasil-hasil pertanian dan hasil usaha masyarakat lainnya ke perusahaan sebagai potensi pasar masyarakat terdekat.
4. Untuk menarik perhatian masyarakat petani menuju kearah usaha tani menetap melalui pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan, maka disamping perusahaan memberikan modal dasar berupa alat-

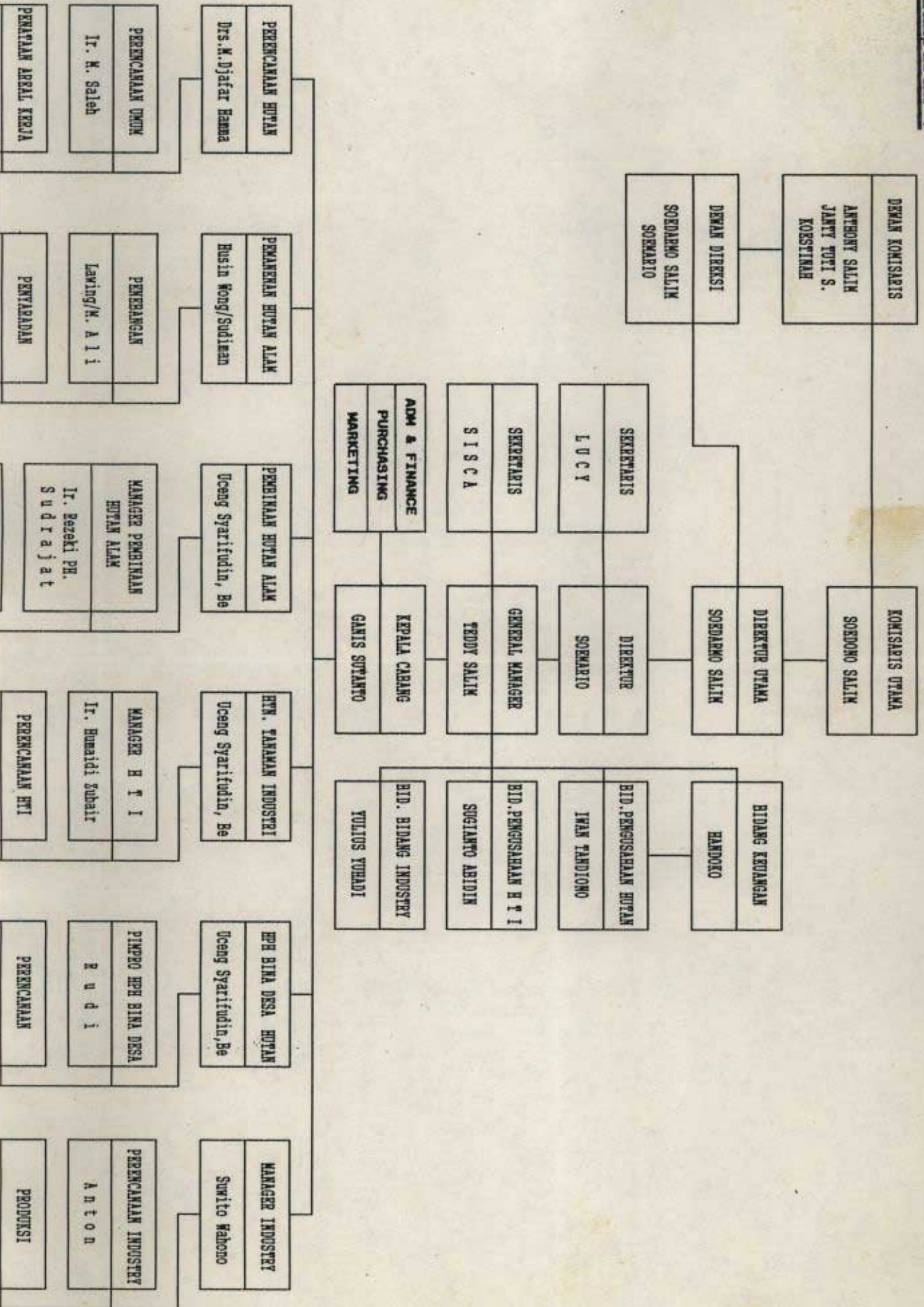
alat pertanian, bibit dan obat-obatan, perlu pula penciptaan program-program khusus seperti percontohan dalam pengembangan farm forestry yang sifatnya penggabungan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan yang memungkinkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap hasil-hasilnya.

5. Perlu ditingkatkannya pembinaan dan penyuluhan pertanian secara intensif untuk mengarahkan para petani menuju ke sistim pertanian menetap.

STRUKTUR ORGANISASI HAK PENGUSAHAAN HUTAN PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS

Gambar .1.

Lampiran 1



Ir. Chairul Anam	Yafed/M. Ali	PERENCANAAN TPPT	Ir. Agus Nanang	Ir. Adi Wahyudi	Mr. Lien
INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PEMBANGUNAN	PENGUKURAN DAN TATA USAHA KAYU	Ir. Evi Eka	PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN	PERANTIAN KERTAP	KILN DRY
Ir. Barata D. Ir. Argitto	S a n u s i	PEMBERASAN TEGAKAN TINGGAL	Ir. Annuddin	Abdul Hamid	Suwito
PENGEDEAN WILAYAH HUTAN	PENGANGKUTAN (HOLLING)	Juwan/Mardan	PERSEMATAN	PENINGKATAN EKONOMI	MOLDING
Ir. Darsono/Ir. Agus	M. Sofyan	I T T	Supiansyah	S o l e a n d	Litna
PENGUKURAN DAN PENCYTAAN	LOG YABO DAN LOG POND	Ir. Abdurahman/Fachri	PENYIAPAN LAHAN	PENGEMBANGAN PRA/SARANA UMUM	MAINTENANCE
Agus Sofyan Hari Supriadi	S u k a d i	Samsuri/Mulyadi	M. H u s n i	S u h a r n o k o	Mr. Sia
TATA HUTAN	PERAKTIAN	PERANAMAN DAN PENGAYAMAN	P E X A N A N A N	PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA	LOGISTIX
M. N O O T	Soeyitdo S.	Hambali/Margono	IR. ABURAHMAN	Drs. Iwanto	Suwito
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN	SARANA & PRASARANA	PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN	PEMELIHARAAN	P S D A DAN LINGKUNGAN	LOADING
Ir. Pitra Yudha	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	Sartono/Rusli	IR. HELMI	Bilung Djuk	Abd. Fachman
	Yongga Wiharja	L I T B A N G	X E A K A N A N	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	ADM & KEUANGAN
		Ir. A m i n	Ambo Siding	Santalah. S.	Uar dan Erlin
		KEAMANAN HUTAN			KEAMANAN
		Supanut/Banapi	PEMUNGUTAN HASIL		Tugjan
		ADM & KEUANGAN	IR. AZIS TABA		
		Santillah S/Asiyah	SARANA PRASARANA		
			M U J I O N O		

DAFTAR PUSTAKA

1. ABD. MAJID, SRI EDI SWASONO. 1981. Wawasan ekonomi Pancasila, UI-Press, Jakarta.
2. A. Arief, R.I, dkk. 1993. Studi diagnostik " HPH Bina Desa Hutan " PT. Oceanias Timber Products, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.
3. ANONIMUS. 1987. Pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila, Yayasan iripartil nasional, Jakarta.
4. -----. 1993. Kriteria dan tolok ukur penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan HPH bina desa hutan, Dirjend. Pengusahaan hutan, Jakarta.
5. -----. 1992. Pedoman pelaksanaan kegiatan HPH bina desa hutan, Dirjend. Reboisasi dan rehabilitasi lahan, Jakarta.
6. -----. 1991. Peranan pemegang hak pengusahaan hutan dalam pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan, Menteri Kehutanan, Jakarta.
7. -----. 1993. Ketetapan-Ketetapan MPR Republik Indonesia Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Jakarta.
8. -----. 1990. Penjabaran demokrasi ekonomi, ISEI, Jakarta.
9. MOCH. SADLI. 1959. Industrial economics, Balai lektur mahasiswa, Jakarta.
10. MOCH. SOERJANI, dkk. 1987. Lingkungan : Sumber daya alam dan kependudukan dalam pembangunan, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta.
11. REKSOHADIPRODJO, S. 1993. Ekonomi sumber daya alam dan Energi, Edisi 2, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
12. RIYANTO, B. 1982. Dasar-Dasar pembelanjaan perusahaan, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Yayasan Gajah Mada, Yogyakarta.
13. SADONO, S. 1978. Ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi, UI, Jakarta.
14. SAYOGYO, TAMBUNAN, M. 1990. Industrialisasi pedesaan, Cetakan Pertama, Kerjasama antara Pusat studi pembangunan Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor dan ISEI, Jakarta.
15. SICAT, G.P., H.W. ARND. 1991. Ilmu ekonomi untuk konteks Indonesia, Cetakan Pertama, PP3ES, Jakarta.

16. SIMANJUNTAK, J.P. 1985. Pengantar ekonomi sumber daya manusia
 , Levi, Jakarta.
17. SUMODININGRAT, G. 1990. Pemerataan pembangunan, Kongres XI
 ISEI, Bandung.

Lampiran 2a.

PT. Oceania Timber Products
Neraca

31 Desember 1991 dan 1990

(Dalam Rupiah)

	Catatan	1991	1990
Aktiva			
Aktiva Lancar			
Kas dan bank	3	131,069,542	116,168,344
Piutang - dagang	4a	906,108,886	1,511,821,890
Piutang lain-lain	4b	1,590,954,350	777,270,724
Persediaan kayu	2b,5	3,507,503,088	3,079,277,780
Uang muka	6a	117,015,000	10,130,000
Biaya dibayar dimuka	6b	271,277,206	295,744,100
Pajak dibayar dimuka	14b	0	0
Jumlah Aktiva Lancar		6.523.923.072	5.790.412.838
Penyertaan	8	4.000.000.000	4.000.000.000
Aktiva Tetap - Dikurangi Akumulasi Penyusutan	2c,7	7.852.534.909	9.150.830.525
Aktiva Lain- Lain 2d,2e,2f,9			
Hak perusahaan hutan		412,000,000	412,000,000
Biaya pendinan		76,231,963	76,231,963
Goodwill		687,825,000	687,825,000
		1,176,056,963	1,176,056,963
Dikurangi : Akumulasi amortisasi		(1,007,820,366)	(951,720,995)
		168,236,597	224,335,968
Sewa Guna Usaha - Nilai Sisa	2.g,16,19	395,034,710	395,034,710
		563,271,307	619,370,678
Jumlah Aktiva		18.939.734.288	19.560.614.041

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Lampiran 2a

PT. Oceanias Timber Products
Neraca

31 Desember 1991 dan 1990

(Dalam Rupiah)

	Catatan	1991	1990
Kewajiban Dan Modal Pemilik			
Kewajiban Lancar			
Kewajiban jangka pendek sewa guna usaha	15	716,391,000	0
Hutang bank	10	4,133,540,753	3,215,813,513
Hutang Dagang	11	985,920	41,340,925
Hutang lain-lain	12	452,795,148	1,351,570,346
Biaya masih harus dibayar	13	212,974,240	113,463,308
Pajak masih harus dibayar	14d	55,194,276	13,029,147
Jumlah Kewajiban Lancar		5,571,881,337	4,735,217,240
Kewajiban jangka panjang - Sewa guna usaha	15		671,579,000
Kewajiban Lain -Lain	16	6,441,384,898	6,359,217,584
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	18	1,926,009,195	1,926,009,195
Modal Pemilik			
Modal saham (modal dasar sebesar Rp 700,000,000 terbagi atas 1400 saham @ Rp 500,000) telah ditempatkan dan disetor penuh 280 lembar saham)	17	140,000,000	140,000,000
Laba yang ditahan		4,860,458,858	4,728,591,022
		5,000,458,858	4,868,591,022
Jumlah Kewajiban Dan Modal Pemilik		18,939,734,288	19,560,614,041

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Lampiran 2a

PT. Cebanindo Timber Products Perhitungan Rugi Laba dan Laba Yang Ditahan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan 1990

(Dalam Rupiah)

	Catatan	1991	1990
Hasil penjualan		16,942,516,813	10,582,631,992
Harga pokok penjualan		11,442,513,167	6,421,309,000
Laba Bruto		5,500,003,646	4,161,322,992
Beban usaha			
Beban reboisasi - HTI		642,982,410	299,109,886
Beban penjualan		827,246,471	445,658,974
Beban umum dan administrasi		2,161,314,416	2,165,679,266
		3,632,043,297	2,910,448,126
Laba Usaha		1,867,960,349	1,250,874,866
Pendapatan (beban) lain - lain		(1,374,653,806)	(648,966,864)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		493,306,543	601,908,002
Taksiran pajak penghasilan badan	14.c	(166,657,100)	(298,246,750)
Laba Bersih		326,649,443	313,661,252
Laba yang ditahan pada awal tahun		4,728,591,027	4,414,929,770
Penyesuaian tahun lalu	18	(194,781,612)	0
Laba Yang Ditahan Pada Akhir Tahun		4,533,809,415	4,414,929,770

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Lampiran 2b.

PT. Oceans Timber Products
Neraca

31 Desember 1993 dan 1992

(Dalam Rupiah)

	Catatan	1993	1992
Aktiva			
Aktiva Lancar			
Kas dan Bank		123,467,171	162,286,131
Piutang	2d, 3	4,183,736,707	4,299,564,685
Persediaan	2b, 4	5,472,651,067	4,882,713,335
Uang muka		127,710,834	275,015,000
Biaya dibayar dimuka		7,500,000	0
Jumlah Aktiva Lancar		9,915,065,779	9,619,579,151
Peyertaan	2e, 5	3,902,000,000	4,000,000,000
Aktiva tetap			
	2f, 6		
Nilai Perolehan		23,773,696,585	23,329,880,012
Dikurangi : Akumulasi penyusutan		17,598,155,413	16,171,385,204
		6,175,541,172	7,158,494,808
Aktiva Lain-lain			
Biaya Pendirian	2i, 7	76,231,963	76,231,963
Hak Pengusahaan Hutan	2j, 7	412,000,000	412,000,000
Goodwill	2k, 7	687,825,000	687,825,000
		1,176,056,963	1,176,056,963
Dikurangi : Akumulasi amortisasi		1,081,433,490	1,049,887,205
		94,623,473	126,169,758
Jaminan Dana Reboisasi	2h	548,116,640	0
		642,740,113	126,169,758
Jumlah Aktiva		20.635.347.064	20.904.243.717

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Neraca ini.

Lampiran 2b

PT. Oceanias Timber Products
Neraca

31 Desember 1993 dan 1992

(Dalam Rupiah)

	Catatan	1993	1992
Kewajiban dan Modal Sendiri			
Hutang bank	8	3,643,386,569	6,543,055,997
Hutang	9	743,711,092	519,869,788
Uang muka diterima		568,789,840	64,596,078
Biaya masih harus dibayar		405,038,504	697,494,961
Pajak masih harus dibayar	2g, 10c	232,162,522	21,498,697
Jumlah Kewajiban Lancar		5,593,088,527	7,846,515,521
Kewajiban Lain			
	11	6,023,377,534	5,357,276,741
Modal Sendiri			
12			
Modal saham, Sebesar Rp. 700,000,000 terbagi atas 1.400 saham @ Rp. 500,000.			
Telah ditempatkan dan disetor penuh 200 saham			
		140,000,000	140,000,000
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	6c	1,926,009,195	1,926,009,195
Laba yang ditahan		6,952,871,808	5,634,442,260
Jumlah Modal Sendiri		9,018,881,003	7,700,451,455
Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri		20,635,347,064	20,904,243,717

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Neraca ini.

Lampiran 2b

PT. Oceanias Timber Products
Perhitungan Rugi Laba dan Laba Ditahan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993 dan 1992

(Dalam Rupiah)

	Catatan	1993	1992
Penjualan	21	25,781,420,150	20,020,162,135
Harga Pokok Penjualan		16,378,027,156	13,754,590,160
Laba Kotor		9,403,392,994	6,265,571,975
Beban Usaha	21		
Beban penjualan		1,832,079,689	1,070,265,933
Beban umum dan administrasi		3,599,906,340	2,391,797,469
Beban reboisasi - Hutan Tanaman Industri		897,639,703	508,106,084
		6,329,625,732	3,970,169,486
Laba Usaha		3,073,767,262	2,295,402,489
Pendapatan/(Beban) Lain-lain		(1,109,755,403)	(1,354,325,891)
Laba sebelum Pajak Penghasilan		1,964,011,859	941,076,598
Taksiran Pajak Penghasilan Badan 2g, 10b		(645,582,311)	(166,666,200)
Laba Bersih		1,318,429,548	774,410,397
Laba ditahan pada awal tahun		5,634,442,260	4,860,458,858
Penyesuaian tahun lalu	13	0	426,995
Laba ditahan pada akhir tahun		6,952,871,808	5,634,442,260

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perhitungan Rugi laba dan Laba Ditahan ini.

Lampiran 3



Situasi Kebun Pangkas/Persemaian TPTI, Jenis Shorea spp.



Situasi HTI, Jenis Parasienthies Falcataria.

Products yang dinyatakan dalam persentase.

4. Tanggapan masyarakat di dalam dan disekitar HPH terhadap kegiatan pelaksanaan HPH. Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products, dinyatakan dalam persentase.
5. Rata-rata pendapatan Kepala Keluarga karyawan PT.Oceanias Timber Products dan penduduk yang tinggal di dalam dan disekitar HPH.
6. Pendapatan per kapita penduduk didalam dan disekitar HPH.
7. Perbandingan antara jumlah anggaran HPH Bina Desa Hutan yang direncanakan perusahaan dan realisasinya.
8. Besarnya persentase keuntungan yang dicapai PT. Oceanias Timber Products setiap tahunnya baik ditinjau dari segi laba sebelum pajak maupun laba sesudah pajak yang dapat dialokasikan terhadap kegiatan pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan yang dikelolanya.

b. Penilaian keberhasilan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan PT. Oceanias Timber Products dalam mengelola hutannya dan pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan maka sebagai indikator di dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan adalah dengan berdasarkan kriteria seperti dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, No. 288/KPTS/IV-PHH/1992, tertanggal 7 Nopember 1992 yaitu :

a. Kriteria Penilaian.

Kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Nilai 0 - 50; | : Kurang |
| 2. Nilai > 50 - 80; | : Sedang |
| 3. Nilai > 80; | : Baik |

b. Tolok Ukur Penilaian

I. Perencanaan, nilai 30 terdiri dari :

- | | |
|---|------------|
| 1. Pra rencana (studi diagnostik); | nilai : 10 |
| a). Tahap persiapan; | nilai : 3 |
| b). Tahap pelaksanaan; | nilai : 5 |
| c). Tahap penyelesaian; | nilai : 8 |
| d). Sudah disahkan; | nilai : 10 |
| 2. Rencana, nilai 20 terdiri dari : | |
| a). Rencana Umum (RKPH), nilai 4 | |
| (1). Belum dibuat; | nilai : 0 |
| (2). Sudah dibuat dan belum disahkan; | nilai : 2 |
| (3). Sudah disahkan; | nilai : 4 |
| b). Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), nilai 6 | |
| (1). Belum dibuat; | nilai : 0 |
| (2). Sudah dibuat dan belum disahkan; | nilai : 3 |
| (3). Sudah disahkan; | nilai : 6 |
| c). Rencana Kerja Tahunan (RKT), nilai 10 | |
| (1). Belum dibuat; | nilai : 0 |
| (2). Sudah dibuat dan belum disahkan; | nilai : 2 |
| (3). Sudah disahkan; | nilai : 10 |

II. Pelaksanaan, nilai 60.

- | | |
|---|------------|
| 1. Realisasi dari rencana fisik dan biaya, nilai 45 yang terdiri dari : | |
| a). Realisasi 0 - 40 % ; | nilai : 15 |
| b). Realisasi > 40 - 85 % ; | nilai : 30 |
| c). Realisasi > 85 % ; | nilai : 45 |
| 2. Keterlibatan masyarakat dan instansi terkait, nilai 10 yang terdiri dari : | |

- a). Masyarakat dan instansi terkait tidak dilibatkan; nilai : 0
 - b). Masyarakat dan instansi terkait hanya dilibatkan pada perencanaannya atau hanya melibatkan pelaksanaannya saja; nilai : 5
 - c). Masyarakat dan instansi terkait dilibatkan dari proses perencanaan s/d pelaksanaan; nilai : 10
3. Organisasi pelaksanaan, nilai 5 terdiri dari :
- a). Tidak ada organisasi dan atau tenaga khusus yang menangani; nilai : 0
 - b). Ada organisasi namun tenaga khusus yang menangani belum ada; nilai : 2
 - c). Ada organisasi dan tenaga khusus yang menangani; nilai : 5
- III. Pelaporan, nilai 10 terdiri dari :
- 1. Tidak dilaporkan secara teratur nilai : 0
 - 2. D dilaporkan namun tidak tepat waktu; nilai : 5
 - 3. D dilaporkan secara tertib dan teratur (bulanan, triwulan dan tahunan) secara tepat waktu; nilai : 10

Khusus untuk penilaian realisasi fisik dan biaya dalam penelitian ini, disamping memperbandingkan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran HPH Bina Desa Hutan juga akan diperhatikan mengenai kondisi kesehatan perusahaan melalui analisis ratio keuangan perusahaan (Likwiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas).

Analisis likwiditas dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan atau dengan kata lain seberapa besar kemampuan perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansilnya bilamana sewaktu-waktu ditagih. Sedangkan analisis solvabilitas dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara semua kekayaan perusahaan dengan semua hutang-hutangnya baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka

panjang atau seberapa jauh perusahaan dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya andaikata dilikwidasi.

Kemudian setelah melihat kondisi perusahaan dari analisis likwiditas dan solvabilitas, maka dilanjutkan dengan analisis rentabilitas. Untuk analisis rentabilitas, yang perlu dilihat disini adalah sampai sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan per tahun dan berapa persen (%) dari keuntungan tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan.

Bila kondisi kesehatan perusahaan ditinjau dari segi analisis likwiditas maupun solvabilitas ternyata cukup stabil dan didukung oleh analisis rentabilitas dengan hasil yang cukup tinggi, kemudian persentase dari keuntungan yang dialokasikan terhadap pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan sangat kecil misalnya hanya 1 %, berarti hal ini kurang menunjang penilaian pada point II.1. di atas. Dan sebaliknya bila dilihat dari kondisi kesehatan perusahaan dengan menggunakan analisis likwiditas dan solvabilitas ternyata sangat kecil atau menunjukkan kesehatan perusahaan dalam keadaan yang cukup kritis, dan hasil analisis rentabilitasnya cukup kecil pula, namun perusahaan masih dapat mengalokasikan hasil keuntungannya per tahun misalnya 5 % untuk pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan, berarti sangat menunjang penilaian pada point II.1. tersebut di atas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Gambaran Umum PT. Oceanias Timber Products.

PT. Oceanias Timber Products (PT. OTP) merupakan salah satu perusahaan kayu yang berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Terbentuknya perusahaan ini adalah berdasarkan Akte Notaris Ridwan Susilo No. 73/26 Juni 1971, dengan nama badan hukum PT. Overseas Timber Products (PT. OTP) dengan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebagai hasil perjanjian antara Departemen Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Overseas Timber Products dengan nomor 238/KPTS/Um/5/73, tertanggal 17 Mei 1973, dan ditanda tangani oleh Menteri Pertanian. Kemudian pada tahun 1975 perusahaan ini diganti namanya dari PT. Overseas Timber Products menjadi PT. Oceanias Timber Products yang didukung oleh SK. Menteri Kehakiman No. Y.A.5/425/I, tertanggal 26 September 1977.

Berdasarkan peruntukan lahan hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan, areal kerja PT. Oceanias Timber Products terbagi dalam tiga fungsi hutan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1. Peruntukan lahan sesuai fungsi hutan PT. Oceanias Timber Products.

U r a i a n	Luas (Ha)
a. Hutan Produksi Tetap	56.000 Ha
b. Hutan Produksi Terbatas	74.500 Ha
c. Hutan yang dapat di Konversi	69.500 Ha
J u m l a h	200.000 Ha

Sumber : PT. Oceanias Timber Products, 1995

Tata batas PT. Oceanias Timber Products berbatasan dengan HPH lainnya seperti PT. Georgia Pasific sepanjang 49 kilometer, batas persekutuan dengan PT. Sumber Mas, PT. Dharma Satya Nusantara, PT. Inhutani dan PT. Mugi Triman sepanjang 193 kilometer. Batas-batas persekutuan tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 1992 yang dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari pihak masing-masing HPH dan dari INTAG.

Selanjutnya dengan berdasarkan hasil pengukuran secara planimetris pada peta Potret Udara Citra Landsat tahun 1990 yang dioverlapkan dengan Peta Realisasi Pengusahaan Hutan selama 20 tahun, telah diperoleh gambaran keadaan hutan areal HPH PT. Oceanias Timber Products seperti pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2. Keadaan Hutan Areal PT. Oceanias Timber Products (Lokasi sepanjang Sungai Telen/Kelinjau)

No.	U r a i a n	Luas/hektar
1.	Virgin Forest Efektif	21.117
2.	Virgin Forest Tersebar	37.253
3.	Kebun Bibit	300
4.	Wilayah Lindung	7.530
5.	LOA	67.200
6.	Bebas Kebakaran	22.196
7.	Hutan Non Productif	17.477
8.	Tanah Kosong	1.827
9.	Lahan Bina Desa	200
10.	Perkebunan TAD	800
11.	Perkebunan PT. OTP	11.000
12.	Rawa	13.090
13.	Lahan Penduduk	10
J u m l a h		200.000

Sumber : PT. Oceanias Timber Products, 1995

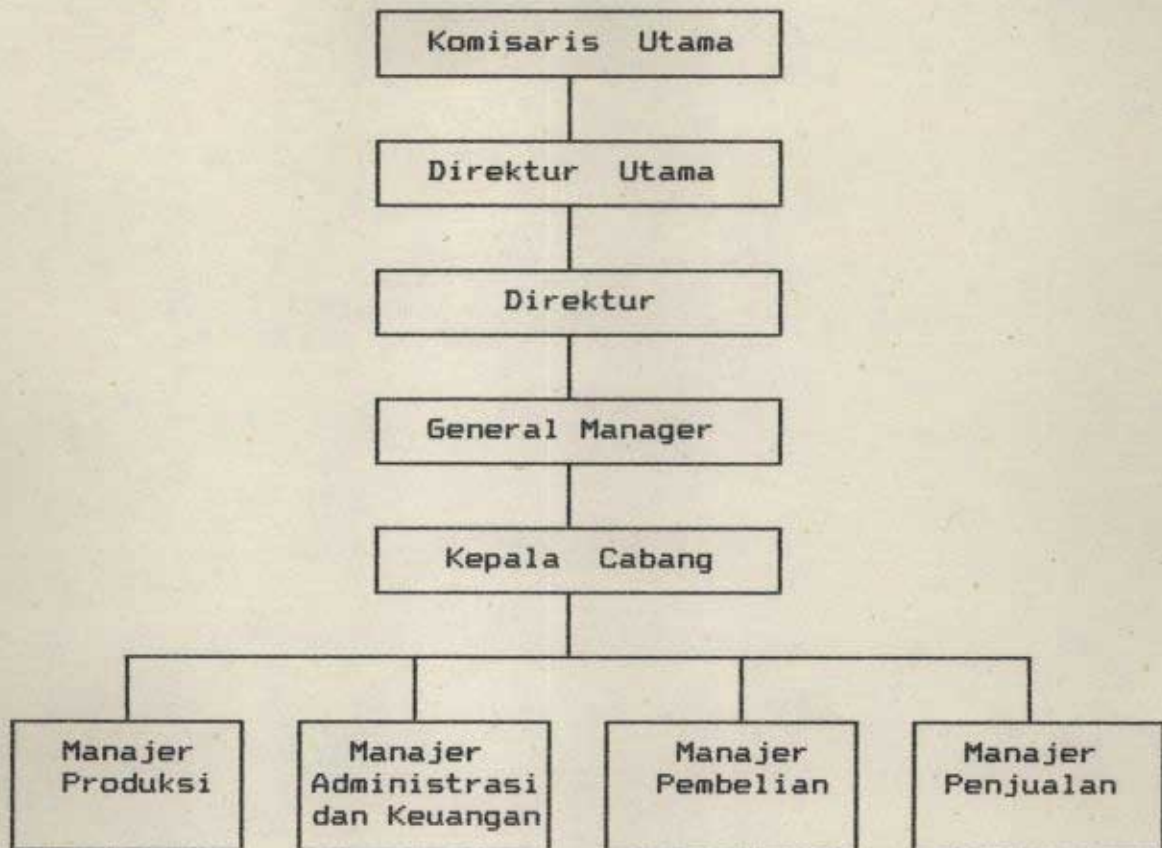
2. Organisasi dan Ketenaga Kerjaan.

a). Organisasi.

Dalam pengelolaan hutan dan pengembangannya di masa datang bentuk organisasi PT. Oceanias Timber Products akan dikembangkan secara bertahap dengan pola manajemen relatif sederhana yang selanjutnya diarahkan kepada profesionalisme melalui latihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Struktur organisasi pada PT. Oceanias Timber Products dalam operasionalnya terdapat 5 kegiatan utama yang meliputi Administrasi, perencanaan, pembinaan, produksi, dan peralatan. Dalam hal ini terdapat seorang Kepala Cabang yang berkedudukan di Samarinda dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi di Jakarta. Selanjutnya Kepala Cabang dibantu oleh 4 manager, yaitu Manager Produksi, Manager Administrasi dan Keuangan, Manager Pembelian dan Manager Penjualan.

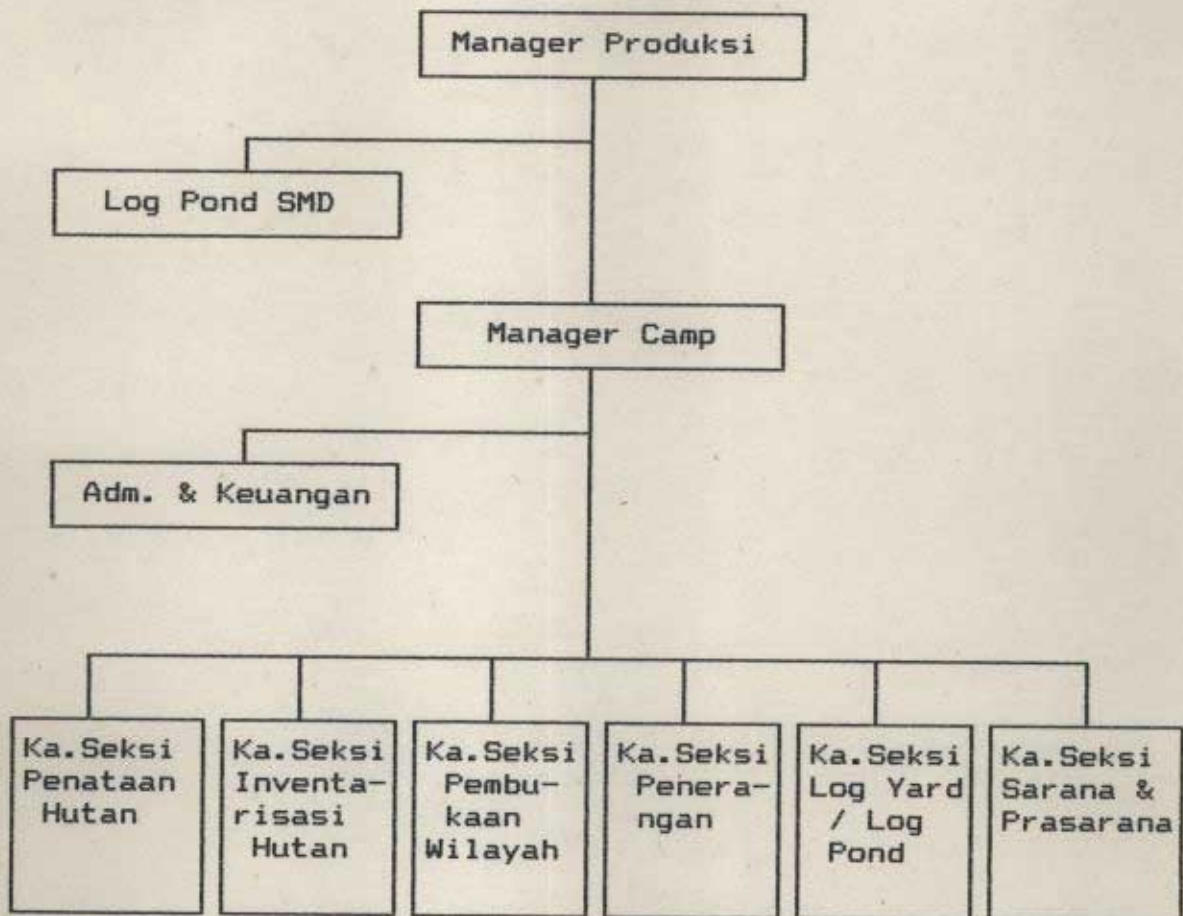
Untuk jelasnya mengenai struktur organisasi PT. Oceanias Timber Products tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 5.1. Struktur Organisasi PT. Oceanias Timber Products

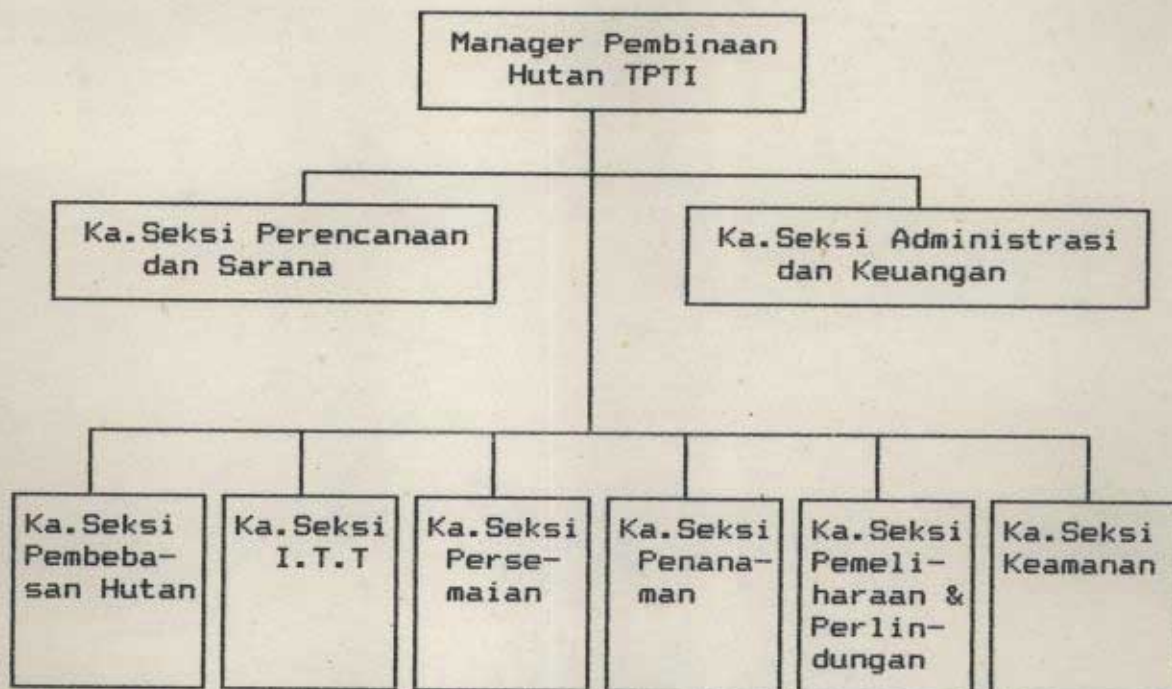
Struktur organisasi bidang pemungutan hasil hutan dipimpin oleh Manager Produksi yang membawahi 6 seksi yaitu Seksi Penataan Hutan, Seksi Inventarisasi Hutan, Seksi Pembukaan Wilayah, Seksi Penebangan, Seksi Log Yard/Log Pond, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Disamping keempat manager tersebut di atas yang tercantum dalam struktur organisasi juga terdapat Manager Pembinaan Hutan TPTI yang membawahi semua kegiatan pembinaan hutan mulai dari pembebasan, ITT, dan persemaian.

Bentuk struktur organisasi bidang pemungutan hasil pada PT. Oceanias Timber Products adalah sebagai berikut :



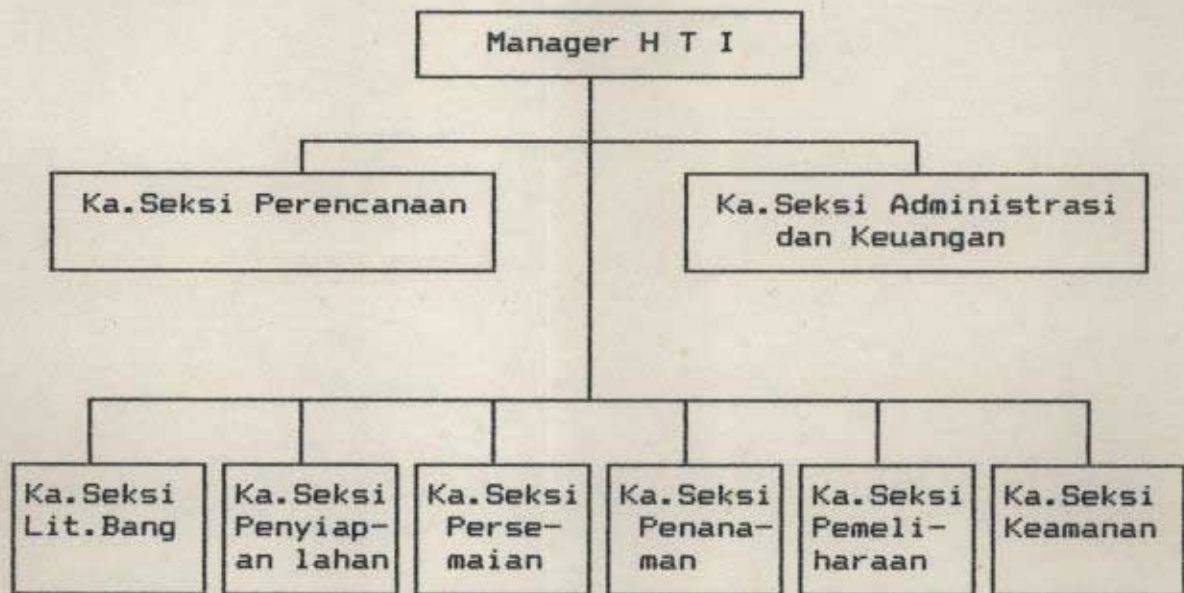
Gambar 5.2. Struktur Organisasi Bidang Pemungutan Hasil Hutan PT. Oceanias Timber Products.

Selanjutnya untuk organisasi pembinaan hutan dipimpin oleh Manager Pembinaan Hutan yang dibantu oleh 1 (satu) orang asisten manager. Asisten Manager Pembinaan Hutan membawahi 8 (delapan) orang Kepala Seksi yaitu : Perencanaan dan Sarana, Administrasi dan Keuangan, Pembebasan hutan, ITT, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan/Perlindungan dan Keamanan.



Gambar 5.3. Struktur Organisasi Pembinaan Hutan PT. Oceanias Timber Products.

Untuk organisasi pembangunan HTI. dipimpin oleh Manager HTI yang bertanggung jawab kepada Camp Manager perusahaan hutan. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang asisten Manager HTI dan membawahi 8 (delapan) orang kepala seksi masing-masing Perencanaan, Administrasi & Keuangan, Lit Bang, Penyiapan Lahan, Persemaian, Pemeliharaan/Perlindungan dan Keamanan. Kemudian Kepala Seksi dibantu oleh beberapa orang mandor.



Gambar 4. Struktur Organisasi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Oceanias Timber Products.

3. Kondisi Pengelolaan Hutan

a). Pengesahan Rencana Karya Pengusahaan Hutan.

PT. Oceanias Timber dalam pengelolaan hutannya terutama dalam pembinaan hutan, eksploitasi hasil-hasil hutan, pengembangan HTI, tetap berdasarkan pada Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan oleh pemerintah yang meliputi :

- Rencana Karya Duapuluh Tahun (RKD);
- Rencana Karya Lima Tahun (RKL); dan
- Rencana Karya Tahunan (RKT).

Dari rencana-rencana pengusahaan hutan tersebut di atas yang disusun oleh perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah akan dirinci sebagai berikut :

(1). Rencana Karya Duapuluh Tahun (RKD), Tahap I.

- Rencana Karya Duapuluh Tahun I (Bulan April 1973 sampai dengan Maret 1993), dengan SK. Pengesahan No.577/III/KPTS/RKD-PS/6/82, tanggal 3 Juni 1982.
- Rencana Karya Lima Tahun I (1973 sampai dengan 1978), SK. Pengesahan No. 1639/DS-II/83, tanggal 16 Mei 1972.
- Rencana Karya Lima Tahun II (1978 sampai dengan 1983), SK. Pengesahan No. 978/DS-II/83, tanggal 26 Maret 1978.
- Rencana Karya Lima Tahun III (1983 sampai dengan 1988),SK. Pengesahan No. 979/KPTS/RKL-N 5/5/83, tanggal 6 Mei 1983.
- Rencana Karya Lima Tahun IV (1983 sampai dengan 1988), SK. Pengesahan No. 709/KPTS/IV/Prog/1987, tanggal 4 Mei 1987.

Dalam rangka pengelolaan hutan selanjutnya pada PT. Oceanias Timber Products untuk masa Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) telah ditetapkan selama 20 tahun (1993/1994 - 2012/2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

(2). Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH), Tahap II.

- Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) II (Bulan April 1993 sampai dengan Maret 2013) SUDAH DIBUAT DAN DIPERBAIKI (SK Dirjen PH No. 537/IV/PPH-2/1995, Tanggal 24 1995 untuk perbaikan), SEMENTARA DALAM PROSES PENGESAHAN DI JAKARTA.

- Rencana Karya Lima Tahun I, periode 1993/1994 sampai dengan 1997/1998, SEMENTARA DALAM PROSES PENGESAHAN DIRJEN PH DI JAKARTA.

- Rencana Karya Tahunan Tahun I, periode 1993/1994, SK. Kanwil Kehutanan Kaltim, No. 19/KPTS/KWL-Kaltim/PH-2/93, Tanggal 08 April 1993.

- Rencana Karya Tahunan Tahun I, periode 1994/1995, SK. Kanwil Kehutanan Kaltim, No.46/KPTS/KWL-Kaltim/PH-2/I/93, Tanggal 29 April 1994.

- Laporan Studi Diagnostik "HPH Bina Desa Hutan", telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pengusahaan Hutan No. 365/IV/PHH-2/94, tanggal 31 Januari 1994.

b). Jalan Angkutan

Perkembangan jalan angkutan pada areal PT. Oceanias Timber Products bertambah setiap tahunnya sesuai dengan pembukaan wilayah baru untuk kegiatan penebangan, pemeliharaan dan kegiatan HTI. Sampai dengan tahun 1992, panjang jalan angkutan masing-masing Jalan utama 185 Kilometer, Jalan Cabang 186 kilometer (rusak 31 kilometer). Jadi panjang keseluruhan 371 Kilometer dan yang dapat digunakan hingga saat ini tinggal 340 Kilometer. Ini berarti bahwa kerapatan jalan angkutan (density of forest road) bilamana jalan yang ada dapat dimanfaatkan semua adalah :

$371.000 \text{ m} : 200.000 \text{ ha} = 1,86 \text{ m/ha}$, sedangkan bilamana hanya memanfaatkan jalan yang baik seperti saat ini berarti :

$340.000 \text{ m} : 200.000 \text{ ha} = 1,70 \text{ m/ha}$.

Perhitungan kerapatan jalan angkutan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung Kerapatan jalan angkutan optimum (Optimum density of forest road) terutama pada hutan produksi tebangan habis seperti pada areal HTI. Perhitungan optimum density of forest road ini sangat penting artinya untuk kegiatan pembinaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

c). Potensi Hutan

Berdasarkan taksiran produksi dari hutan alam dengan menggunakan target minimal dari total tebangan sebesar :

- AAC minimal = 382.000 m³/ha
- Jangka waktu kerja = 15 tahun
- AAC 15 tahun = 5.730.000 m³
- Jatah tebangan per tahun = 200.000 ha : 35 tahun
= 5,741,29 ha/tahun
- Potensi hutan perawan = 382.000 : 5.741,29
= 66,85 m³/ha.

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi luas tebangan pada PT. Oceanias Timber Products selama duapuluh dua tahun (22 tahun) yaitu dari tahun 1973/1974 - 1994/1995 mengelola HPHnya, adalah 72.609 ha, dengan volume produksi kayu bulat sebanyak 2.661.447 m³. Hal ini berarti bahwa realisasi luas tebangan tersebut hanya 86,23 % dari yang direncanakan yaitu 84.200 ha, demikian pula realisasi volume produksi kayu bulat hanya 72,03 % dari yang direncanakan (3.695.120 m³). Jadi secara rata-rata luas tebangan pada areal HPH PT. Oceanias Timber Products selama 22 tahun beroperasi di Camp Sungai Kelinjau dan Sungai Marah adalah 3.300,41 ha per tahun, dengan rata-rata volume produksi sebanyak 120.974,86 m³ pertahun.

Khusus untuk pemanfaatan hasil hutan ikutan seperti rotan, madu, dan buah-buahan biasanya dikelola langsung oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar HPH sebagai penghasilan tambahan selain pekerjaan pokok yang ditekuni masing-masing.

Mengenai rencana dan realisasi produksi kayu bulat pada PT. Oceanias Timber Products selama pengusahaannya dari tahun 1973/1974 - 1994/1995 dapat dilihat pada Tabel 5.3. berikut ini :

Tabel 5.3. Perkembangan Produksi Kayu Bulat PT.Oceanias Timber Products, selama jangka waktu Pengusahaan Hutan 1973 - 1995

Tahun	Luas (Ha)		Produksi (m ³)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1973/1974	5.300	5.000	270.000	210.000
1974/1975	5.500	5.300	320.000	235.000
1975/1976	5.500	5.300	320.000	253.000
1976/1977	5.400	5.400	150.000	254.710
1977/1978	5.400	5.400	235.000	120.167
1978/1979	5.000	4.600	235.000	192.206
1979/1980	4.200	3.900	245.000	183.577
1980/1981	4.000	3.500	240.000	166.762
1981/1982	3.500	2.000	120.000	91.662
1982/1983	2.600	1.700	136.000	98.711
1983/1984	3.300	2.800	136.000	57.895
1984/1985	2.700	2.200	115.000	54.510
1985/1986	2.900	1.700	115.000	64.271
1986/1987	2.500	2.300	125.000	66.327
1987/1988	3.200	2.800	125.000	68.665
1988/1989	4.600	4.200	124.000	91.469
1989/1990	4.600	2.600	141.000	66.072
1990/1991	3.700	3.300	135.000	95.040
1991/1992	3.700	3.613	94.120	93.605
1992/1993	2.700	2.244	81.000	65.566
1993/1994	1.900	1.555	73.000	71.446
1994/1995	2.000	1.197	75.000	61.777
Jumlah	84.200	72.609	3.695.120	2.661.447

Sumber : PT. Oceanias Timber Products 1995.

Dari tabel 5.3. di atas terlihat bahwa baik untuk luas areal tebangan maupun jumlah produksi kayu bulat mengalami naik turun setiap tahunnya disebabkan karena adanya kebakaran hutan yang menimpah sebagian areal PT. Oceanias Timber Products seperti yang terjadi pada tahun 1982 dan 1983 sehingga sebagian pohon yang dapat dipungut ikut terbakar. Dengan adanya kebakaran hutan tersebut berarti ikut mempengaruhi luas tebangan yang direncanakan dan sekaligus target produksinya pada tahun-tahun berikutnya.

4. Kawasan Hutan.

Secara geografis areal kerja HPH PT. Oceanias Timber Products, terletak antara $0^{\circ}40'$ - $1^{\circ}25'$ Lintang Utara dan $116^{\circ}20'$ - $116^{\circ}50'$ Bujur Timur.

Kemudian menurut pembagian wilayah dan Administrasi Pemangkuan Hutan, kelompok hutan Sungai Kelinjau dan Sungai Marah termasuk wilayah RPH Muara Dun dan Muara Marah, BKPH Muara Wahau dan Muara Ancalong, CDK Mahakam Tengah, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur.

Mengenai potensi hutan atau jenis kayu komersial yang terkandung di dalamnya pada umumnya didominir oleh jenis meranti (*Shorea* spp.), Kapur (*Dryobalanops* spp.), Bankirai (*Shorea laevis*), Keruing (*Dipterocarpus* spp.), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), Nyatoh (*Palaquium rostratum*) dan lain-lain. Sedangkan jenis kayu cepat tumbuh yang menjadi program Hutan Tanaman Industri perusahaan ini yang telah dimulai sejak tahun 1990/1991 hingga saat ini, menetapkan jenis Sengon (*Parasienthies falcataria*) dan Karet (*Hovea braziliensis*).

Disamping itu dalam areal ini banyak juga dijumpai jenis Flora dan Fauna yang dilindungi. Untuk jenis Flora antara lain Anggerek (*Orchidaceae* spp.), Kemenyan (*Styrax benzoin*), Balam merah (*Palaquium gluta*), Jelutung (*Dyera costulata*), Bengris (*Kompasia* spp) Tengawang (*Shorea* spp) dan lain-lain. Sedangkan jenis Fauna antara lain seperti Rusa/Payau (*Cervus unicolor*), Banteng (*Bos sondaicus*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Beruang (*Helactus* spp), Orang utan (*Pongo* spp) dan beberapa jenis burung

(Aves spp). Jenis rotan (Calamus spp) juga banyak dijumpai dalam areal tersebut yang sekaligus dapat diambil masyarakat sebagai bahan baku untuk anyam-anyaman. Khusus untuk jenis rotan merupakan hasil hutan non kayu yang sangat potensial untuk dikembangkan oleh masyarakat dikemudian hari sebagai bahan baku industri kerajinan yang memungkinkan mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi bilamana dilakukan pembinaan secara intensif. Pengkaderan beberapa anggota masyarakat yang berbakat untuk industri kerajinan rotan tersebut yang diprogramkan oleh perusahaan adalah salah satu kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai potensi hutan berupa kayu tersebut, dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4. Jumlah Pohon per hektar (N/Ha) dan Volume Pohon per hektar (M3/Ha) di areal HPH. PT. Oceanias Timber Products.

Diameter (Cm)	Dipterocarpaceae		Non Dipterocarpaceae		Jumlah	
	N/Ha	M3/Ha	N/Ha	M3/Ha	N/Ha	M3/Ha
20 - 49	10,01	8,97	3,70	3,24	13,71	12,21
50 Up	16,94	86,71	5,72	21,35	22,66	108,06
Jumlah						120,27

Sumber : Studi Diagnostik "HPH Bina Desa Hutan" PT. Oceanias Timber Products, 1994).

Dalam pemuliaan hutan PT. Oceanias Timber Products juga telah melakukan TPTI dengan menanam jenis meranti, kapur masing-masing tahun 1991/1992 (6.653 ha), 1992/1993 (6.200 ha), 1993/1994 (3.700 ha), 1994/1995 (2.600 ha). Untuk kelanjutan TPTI tersebut pada tahun 1992/1993, perusahaan juga telah menye-

maikan jenis kayu lokal seperti kapur, meranti, keruing dan lain-lain sebanyak 600.600 pohon sebagaimana yang ditargetkan.

Selain TPTI, juga telah dilaksanakan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 2.410,42 ha, dengan jenis Sengon 1.730,42 ha, Karet 480 ha dan jenis tanaman unggulan seperti meranti, kapur, keruing (sistim sisipan diantara tanaman sengon dan karet) seluas 200 ha. HTI untuk jenis sengon dan karet telah dilaksanakan sejak 1990/1991 - 1994/1995, sedangkan jenis tanaman unggulan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1994/1995.

5. Ketenaga Kerjaan.

Dari segi ketenaga kerjaan pada areal kerja PT. Oceanias Timber Products hingga bulan Mei 1994 jumlah tenaga kerja yang ada untuk berbagai kegiatan perusahaan sebanyak 517 orang.

Status, jumlah dan persentase tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5.5. Status Tenaga Kerja PT.Oceanias Timber Products

Status	Logging (SK+SM) (Orang)	Binhut (Orang)	H T I (Orang)	Jumlah (Orang)	Persentase
Bulanan	124	17	25	166	32,11
Harian Tetap	42	30	-	72	13,92
Harian Lepas	32	37	136	205	39,65
Borongan / Musiman	59	-	-	59	11,42
	-	15	-	15	2,90
Jumlah	257	99	161	517	100

Sumber : PT. Oceanias Timber Products, 1994.
(diolah kembali)

Ditinjau dari segi posisi jabatan tenaga kerja lokal pada PT. Oceanias Timber Products sebagian besar menjadi tenaga teknis dilapangan.

Khusus untuk bagian teknis mekanik (perbengkelan) dan operator alat-alat besar lebih banyak dikuasai oleh tenaga kerja non-lokal atau pendatang dari luar Kalimantan seperti Jawa, Timor, Sulawesi dan lain-lain. Demikian pula tenaga staf Kantor lebih banyak diduduki oleh tenaga kerja non-lokal sebagai akibat tenaga kerja lokal yang mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan tersebut umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengalaman dan tingkat keterampilan yang dimilikinya.

Posisi jabatan yang diduduki dan jumlah tenaga kerja lokal (masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar HPH) yang bekerja pada PT. Oceanias Timber Products tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6. Posisi Jabatan Tenaga Kerja Lokal Berdasarkan Kelompok Pekerjaan pada PT. Oceanias Timber Products

Status	Jumlah (Orang)	Status	Jumlah (Orang)
I. PEMANENAN :		II. BINHUT :	
-Cashier	1	-Administrasi	1
-PKBRI	2	-Sarana/Prasana	3
-Surveyor	3	-Persemaian	12
-Staf logs control	1	-Penanaman	1
-Operator Chain Saw	6	-Pemeliharaan	1
-Hokman Chain Saw	5	-Mandor	2
-Driver Dump Truck	2	-Pembantu mekanik	1
-Driver Dump Tangki	1	-Karyawan musiman	15
-Hokman Dump Tangki	1		
-Driver logging Truck	9	Jumlah	36
-Hokman logging truck	4		
-Scaler Log	2	III. H T I	
-Hokman Grader	1	-Operator SSB	1
-Operator Kepiting	2	-Perencanaan	3
-Hokman Kepiting	1	-Administrasi	2
-Operator Tractor	1	-Mechanic	2
-Mechanic Tractor	4	-Driver (Mb.Karyawan)	2
-Operator Mesin Bubut	1	-Camp Facility	2
-Kepala Perakitan	2	-Persemaian	13
-Pbt.Ka.Perakitan	1	-Penyiapan lahan	12
-Pengawas rakit	1	-Logistik	1
-Anggota Perakitan	9	-Operator Chain Saw	5
-Foreman Perakitan	1	-Pemungutan hasil	6
-Serabutan	1	-Agro Forestry	7
-Paku S	1	-Mandor Penanaman	1
-Kepala Pengukuran	1	-Log Grader	1
-Gudang Spare Parts	1		
-Bagian BBM	2		
-Mes Boy	1		
-Sat Pam Km 52	1		
-Waker Long Le'es	1		
-Harian Umum	3		
Jumlah	73		58

Sumber : Hasil Studi 1994.

Mengenai tingkat pendidikan karyawan PT. Oceanias Timber Products masing-masing tingkat SD = 44,49 %, SLTP = 21,66 %, SLTA = 28,43 %, program D3 = 1,74 % dan Sarjana 3,68 %. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7. Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja
PT.Oceanias Timber Products

Status	Logging (SK+SM) (Orang)	Binhut (Orang)	H T I (Orang)	Jumlah (Orang)	Persentase
Sekolah Dasar	111	59	60	230	44,49
SLTP/Sederajat	63	11	38	112	21,66
SLTA/Sederajat	70	24	53	147	28,43
SARMUD/D3	3	3	3	9	1,74
SARJANA (S1)	10	2	7	19	3,68
Jumlah	257	99	161	517	100

Sumber : PT. Oceanian Timber Products 1994
(diolah kembali)

Jumlah tenaga kerja lokal atau masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar (sepanjang perbatasan) HPH PT. Oceanias Timber Products pada tingkat Kecamatan yang disebut tenaga kerja lokal meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Muara Wahau yaitu sebanyak 167 Orang (32,30 %), pada tingkat Kabupaten Kutai keseluruhan sebanyak 219 orang (42,36 %) dan pada tingkat Propinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan sebanyak 283 orang (54,74 %).

Jadi jumlah tenaga kerja yang berasal dari luar Kalimantan Timur sebanyak 234 orang atau sekitar 45,26 % dari jumlah tenaga kerja yang ada.

Untuk lebih jelasnya dari pada jumlah tenaga kerja tersebut ditinjau dari segi daerah asal dapat dirinci seperti pada Tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5.8. Perbandingan antara tenaga kerja lokal dengan non-lokal, PT. Oceanias Timber Products.

Daerah	Jumlah (Orang)	(%)
a. Masyarakat yg tinggal di dalam dan disekitar HPH (Tingkat Kecamatan atau Lokal)	167	32,30
b. Dalam lingkungan Kab. Kutai (diluar point a)	52	10,06
c. Dalam lingkungan Prop. Kaltim (diluar point a dan b)	64	12,38
d Dari Luar Kaltim	234	45,26
Jumlah	517	100

Sumber : Hasil Studi 1994.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan hutan dalam jangka panjang perlu adanya Tenaga teknis Kehutanan Indonesia yang cukup dimiliki oleh setiap pemegang HPH. Hal ini terutama untuk tenaga teknis Pembinaan dan HTI dimaksudkan untuk penyelamatan hutan tropis basah khususnya di Kalimantan Timur secara seimbang, serasi dan lestari. Jumlah tenaga teknis Kehutanan pada PT. Oceanias Timber Products yang berstatus Sarjana Kehutanan sebanyak 16 orang dan Sarjana Non Kehutanan sebanyak 6 orang (termasuk 3 orang dari Kantor Pusat Jakarta). Sedangkan Sarjana Muda Kehutanan sebanyak 5 orang dan Sarjana Muda Non Kehutanan sebanyak 2 orang. SKMA/KKMA sebanyak 5 orang dan yang lainnya rata-rata berpendidikan SLTA diluar SKMA/KKMA dan SLTP umumnya telah mengikuti Diklat Kehutanan baik yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kehutanan di Samarinda maupun di IPB Bogor. Demikian pula yang berpendidikan Sarjana Non Kehutanan dan

Sarjana Muda Non Kehutanan umumnya telah pernah mengikuti Diklat Kehutanan.

Mengenai Tenaga teknis yang dimiliki oleh PT. Oceanias Timber Products hingga penelitian ini dilakukan terdapat sebanyak 88 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.9. Tenaga Teknis Kehutanan Indonesia PT. Oceanias Timber Products

No.	Uraian	Pemanenan	TPTI	H T I	Jumlah
1.	Sarjana	10	7	5	22
2.	Sarjana Muda/D3	1	3	3	7
3.	SKMA/KKMA	1	1	2	4
4.	Pembinaan	-	4	9	13
5.	Cruiser	3	4	4	11
6.	Perencanaan	2	3	3	8
7.	Scaller	6	-	2	8
8.	Grader	6	-	1	7
9.	Pengenal pohon	3	3	2	8
	Jumlah	32	24	32	88

Sumber : PT. Oceanias Timber Products, 1995
(diolah kembali)

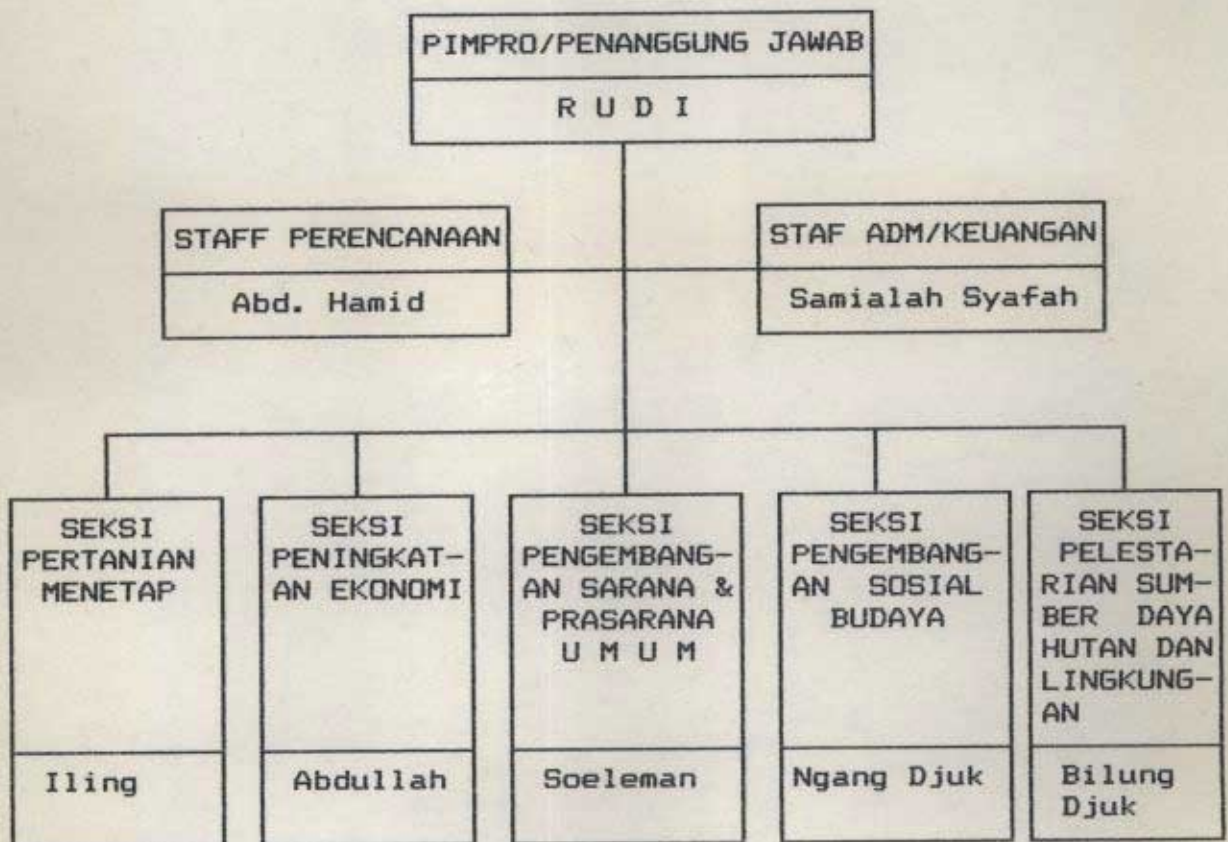
6. HPH Bina Desa Hutan.

a). Organisasi.

Secara struktural mengenai HPH Bina Desa Hutan pada PT. Oceanias Timber Products dipimpin oleh seorang Pimpinan Proyek (Pimpro). Pimpro disini adalah sebagai penanggung jawab HPH Bina Desa Hutan dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang yang berkedudukan di Samarinda dan bekerja sama dengan Manager Camp. Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpro HPH Bina Desa Hutan dibantu oleh 2 (dua) orang staf dan 5 (lima) orang Kepala Seksi yaitu Seksi Perencanaan dan Administrasi, Seksi Pertanian Menetap, Seksi

Peningkatan Ekonomi, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum, Seksi Pembangunan Sosial Budaya, Seksi Pelestarian Sumber Daya Hutan dan Lingkungan. Sedangkan masing-masing Kepala Seksi tersebut dibantu oleh beberapa mandor.

Bentuk struktur organisasi HPH Bina Desa Hutan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.5 sebagai berikut :



Gambar 5.5. : Struktur Organanisasi HPH Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products.

b). Program HPH Bina Desa.

Sejak program pembangunan desa yaitu pembentukan Kader Usaha Tani menetap (Tanitap), PT. Oceanias Timber Products telah menyediakan lahan pertanian menetap untuk peserta Bina Desa Hutan seluas 200 Hektar pada Km 7 di Dusun Muara Dun (Desa Long Nah).

Jumlah peserta Bina Desa Hutan di lokasi Tanitap yang tercatat sebanyak 150 orang yang berasal dari Desa Long Nah (Dusun Muara Dun 50 KK, Dusun Gemar Baru 50 KK), dan Desa Melan sebanyak 50 KK. Namun kenyataan dilapangan baru 10 KK yang secara intensif mengikuti program HPH Bina Desa Hutan di areal yang telah disediakan oleh perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan pertanian sehari-hari misalnya menebas, mencangkul dan lain-lain, umumnya para petani masih menggunakan alat-alat pertanian tradisional seperti arit, parang dan cangkul dan lain-lain.

Kegiatan berladang biasanya dimulai pada bulan kemarau antara bulan Maret hingga Mei setiap tahunnya. Luas ladang yang digarap oleh penduduk sekitar 3 hektar untuk ladang pribadi dan 5 hektar ladang kelompok.

Ladang pribadi masyarakat tersebut dalam pengelolaannya dilakukan dengan cara berpindah-pindah yang tersebar disepanjang tepi sungai Kelinjau dan sepanjang kiri-kanan jalan angkutan kayu. Ladang tersebut umumnya telah dimulai sebelum PT. Oceanias Timber Products berada di tengah-tengah mereka.



Photo 5.1. Balai Pertemuan HPH Bina Desa Hutan PT.OTP.



Photo 5.2. Lokasi Agroforestry PT.OTP.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat di dalam dan disekitar areal HPH PT. Oceanias Timber Products dalam kaitannya dengan kehadiran perusahaan tersebut di Kecamatan Muara Ancalong telah diadakan wawancara kepada 37 Responden sebagai sampel di 3 Desa Binaan meliputi Desa Long Nah (Dusun Muara Dun dan Gemar Baru), Desa Melan dan Desa Long Pejeng. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sekitar 97,30 % menyatakan "Senang" dan 2,70 % menyatakan "Tidak senang". Alasannya bagi yang "Senang " adalah karena perusahaan dapat membantu masyarakat setempat dan terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk lokal yang berminat bekerja diperusahaan tersebut. Sedangkan bagi yang tidak senang karena merasa haknya tidak dipenuhi perusahaan.

Selanjutnya tanggapan masyarakat mengenai adanya program Bina Desa Hutan yang diselenggarakan PT. Oceanias Timber Product dapat dilihat pada Tabel 5.10 sebagai berikut :

Tabel 5.10. Tanggapan masyarakat di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products, tentang Program HPH Bina Desa Hutan.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Kesediaan masyarakat mengenai adanya HPH Bina Desa Hutan :		
	a. Senang	28	75,68
	b. Tidak Senang	9	24,32
2.	Keterlibatan sebagai anggota HPH Bina Desa Hutan :		
	a. Terlibat	18	48,65
	b. Tidak terlibat	19	51,35
3.	Manfaat HPH Bina Desa Hutan :		
	a. Sangat bermanfaat	2	5,41
	b. Bermanfaat	5	13,51
	c. Cukup bermanfaat	12	32,43
	d. Belum bermanfaat	15	40,54
	e. Tidak bermanfaat	3	8,11
4.	Pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan:		
	a. Sesuai dengan keinginan masyarakat	13	35,14
	b. Belum sesuai	20	54,05
	c. Tidak sesuai	4	10,81
5.	Jumlah masyarakat yang bekerja pada perusahaan terdekat :		
	a. Banyak	4	10,81
	b. Cukup	13	35,14
	c. Kurang	20	54,05
	d. Tidak ada sama sekali	0	0
6.	Hasil usaha masyarakat yang di jual kepada perusahaan :		
	a. Banyak	2	5,40
	b. Cukup	13	35,14
	c. Kurang	17	45,95
	d. Tidak ada sama sekali	5	13,51

Sumber : Hasil Studi 1994.

Pada Tabel 5.10, di atas dapat diketahui tentang tanggapan masyarakat di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products khususnya mengenai HPH Bina Desa Hutan yang telah diprogramkannya. Dari hasil perhitungan tanggapan masyarakat mengenai HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan perusahaan ini menunjukkan bahwa sekitar 75,68 % menyatakan "Senang" dengan alasan bisa mendapatkan bantuan berupa alat-alat pertanian sederhana, obat-

obatan serta pembinaan bertani menetap dari perusahaan dan hanya 24,32 % menyatakan "Tidak Senang" karena lokasi HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan perusahaan jauh dari tempat pemukiman mereka dan sebagian kecil yang beralasan karena tidak terpenuhinya keinginan mereka dari perusahaan.

Dari 3 Desa yang digunakan sebagai sampel yaitu Long Nah, Long Pejeng dan Melan terdapat 37 responden yang berhasil diwawancarai dan 48,65 % yang terdaftar sebagai anggota HPH Bina Desa Hutan dan 51,35 % yang belum mendaftarkan diri dengan alasan masih ingin menekuni pekerjaan yang selama ini dilakukan.

Secara global tanggapan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar HPH tentang manfaat pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan yang dilaksanakan oleh PT. Oceanias Timber Products menunjukkan hasil masing-masing; Sangat bermanfaat 5,41 %, Bermanfaat 13,51 % , Cukup bermanfaat 32,43 %, Kurang bermanfaat 40,54 % dan Tidak bermanfaat 8,11 %. Bilamana dikaji lebih dalam tanggapan masyarakat tersebut secara rata-rata berarti masih berada pada posisi yang "Cukup bermanfaat".

Untuk membandingkan kesesuaian antara keinginan masyarakat dengan pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan tersebut, hasil perhitungan menunjukkan masing-masing, Sesuai dengan keinginan masyarakat 35,14 %, Belum sesuai 54,05 % dan Tidak sesuai 10,81 %. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal HPH Bina Desa Hutan dilaksanakan hasil yang dicapai masyarakat petani belum menggembarakan bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh bila mereka melakukan perladangan berpindah-pindah. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki dan belum siapnya mental masyarakat untuk bercocok tanam padi sawah adalah juga merupakan kendala menuju

sistim pertanian menetap.

Mengenai jumlah masyarakat setempat yang dapat bekerja pada perusahaan terdekat termasuk PT.Oceanias Timber Products masih relatif kurang. Tanggapan masyarakat dari 37 responden yang berhasil diwawancarai menunjukkan masing-masing, Banyak 10,81 %, Cukup 35,14 %, dan Kurang 54,05 %. Tingkat persaingan dengan pendatang yang ditunjang dengan pendidikan dan keterampilan serta pengalaman kerja yang cukup memadai adalah merupakan hambatan utama bagi penduduk lokal untuk menduduki posisi penting dalam perusahaan sehingga umumnya diantara mereka yang dapat direkrut perusahaan hanya sebagai pelaksana teknis dan buruh lapangan.

Kemudian dalam menunjang ekonomi masyarakat khususnya dalam pemasaran hasil-hasil pertanian dan usaha ternak masyarakat lainnya ke perusahaan terdekat masih kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan karyawan perusahaan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya hubungan antara masyarakat setempat dengan perusahaan untuk memfungsikan lembaga-lembaga ekonomi yang ada seperti KUD sebagai salah satu jembatan penghubung untuk pemasaran hasil-hasil pertanian, usaha ternak, usaha kerajinan tangan dan usaha-usaha masyarakat lainnya yang dapat disuplai ke perusahaan dalam skala besar. Selama ini usaha pemasaran hasil-hasil pertanian serta hasil usaha masyarakat lainnya yang dapat disuplai ke perusahaan masih sangat terbatas jumlahnya. Hal ini disebabkan karena sifatnya dalam tahap penjualan langsung atau secara perorangan menjual ke perusahaan sehingga kemampuan mereka untuk mengangkut barang-barang jualan mereka dengan jarak tempuh yang cukup jauh terbatas pula. Dari hasil tanggapan masyarakat mengenai hasil-hasil usaha masyarakat yang dapat

dijual kepada perusahaan menunjukkan masing-masing; Banyak 5,40 %, Cukup 35,14 %, Kurang 45,95 % dan Tidak ada sama sekali 13,51%.

c). Pendapatan Petani.

Untuk mengetahui secara global rata-rata pendapatan keluarga antara masyarakat di dalam dan disekitar HPH dengan sample 37 KK dan karyawan Camp PT. Oceanias Timber Products dengan sample 30 orang dapat dilihat pada Tabel 5.11 sebagai berikut :

Tabel 5.11. Rata-rata pendapatan Kepala Keluarga Penduduk di dalam dan disekitar HPH, dan Karyawan PT. Oceanias Timber Products.

Uraian	Pendapatan Kepala Keluarga		Sample (Orang)
	Perbulan	Pertahun	
Karyawan	Rp.254.667,-	Rp.3.056.000,-	30
Masyarakat	Rp. 93.158,-	Rp.1.117,895,-	37

Sumber : Hasil studi 1994.

Dari tabel 5.11, di atas perlu dijelaskan bahwa pendapatan keluarga untuk karyawan Camp PT. Oceanias Timber Products maksimum Rp. 750.000,- dan minimum Rp. 100.000,-. Pendapatan karyawan disini tidak termasuk Manager Camp karena pada saat dilakukan penelitian ini sementara dalam proses penggantian Manager Camp.

Data yang berhasil diperoleh adalah mulai dari pendapatan manajer unit kegiatan, pada Kepala Seksi hingga karyawan Camp perusahaan. Sedangkan untuk pendapatan keluarga masyarakat di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products maksimum Rp. 1.000.000,- dan minimum Rp. 30.000,-.

Biasanya masyarakat yang tingkat pendapatannya mencapai sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan adalah bagi mereka yang

mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang, dan yang mempunyai penghasilan sangat kecil adalah petani biasa.

Jadi bila dibandingkan pendapatan antara karyawan perusahaan dengan pendapatan para petani mempunyai perbedaan yang cukup berarti terlebih bila dihitung pertahun. Hal ini disebabkan karena bagi karyawan perusahaan, pendapatan yang diperolehnya merupakan sesuatu yang pasti diterimanya dari perusahaan setiap bulannya sepanjang masih mampu bekerja, sedangkan bagi petani pada umumnya berdasarkan kepada musim panen dan kemampuan fisik untuk menggarap ladang, usaha ternak, berburu dan dari hasil-hasil kerajinan lainnya.

Selanjutnya bila ditinjau dari segi pendapatan perkapita penduduk di dalam dan sekitar HPH, dengan sample 37 KK atau sebanyak 149 jiwa, setelah dibandingkan antara jumlah pendapatan masyarakat secara keseluruhan dengan jumlah jiwa, maka hasil perhitungan menunjukkan sebesar Rp. 23.133,15/jiwa/bulan atau Rp. 277.598,28/jiwa/tahun.

Menurut angka Statistik Propinsi Kalimantan Timur tahun 1993 tentang rata-rata pendapatan perkapita penduduk miskin di daerah ini masing-masing;

- a. Kota, sebesar Rp. 40.012,-/jiwa/bulan atau Rp. 480.144,-/jiwa/tahun.
- b. Desa, sebesar Rp. 29.011,-/jiwa/bulan atau Rp. 348.132,-/jiwa/tahun.

Jadi bila dibandingkan antara pendapatan penduduk di dalam dan disekitar HPH PT. Oceanias Timber Products dengan rata-rata pendapatan penduduk miskin di Kalimantan Timur berarti pendapatan mereka masih berada dibawah garis kemiskinan.

d). Rencana dan realisasi HPH Bina Desa.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan PT. Oceanias Timber Products telah melakukan beberapa jenis kegiatan sebagaimana yang diprogramkan. Kegiatan ini meliputi; pertanian menetap, usaha peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana umum, sosial budaya, pelestarian sumber daya hutan dan pembentukan petugas HPH Bina Desa Hutan di lapangan. Rencana dan realisasi program HPH Bina Desa Hutan yang telah dilaksanakan PT. Oceanias Timber Products untuk 3 (tiga) desa binaannya hingga saat ini masih dipusatkan pada 2 Desa masing-masing Desa Long Nah (Dusun Muara Dun, Dusun Gemar Baru), dan Desa Melan, sedangkan untuk Desa Long Pejeng masih dalam tahap ketenaga kerjaan dan bantuan lainnya. Selama tahun RKT 1994/1995, rencana dan realisasi anggaran pada kedua desa binaan tersebut di atas meliputi :

- (1). Desa Long Nah (Dusun Muara Dun). Pada bulan Maret 1994, jumlah anggaran yang direncanakan oleh perusahaan untuk kepentingan HPH Bina Desa Hutan sebesar Rp. 94.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 100.040.000,- atau 107,50 %. Ini berarti bahwa dalam realisasi pembiayaan kegiatan tersebut terdapat kelebihan sebesar Rp. 640.000,- atau naik sebesar 7,50 % dari yang direncanakan.
- (2). Desa Melan. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan HPH Bina Desa Hutan pada Desa Melan pada bulan Februari 1995 sebesar Rp. 17.750.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 18.250.000,-. Kelebihan realisasi dari yang

direncanakan sebesar Rp. 500.000,- atau 2,82 %.

- (3). Desa Long Nah (Dusun Gemar Baru). Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan HPH Bina Desa Hutan pada Dusun Gemar Baru pada bulan Februari 1995 sebesar Rp. 19.600.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 20.250.000,-. Kelebihan realisasi dari yang direncanakan sebesar Rp. 6.250.000,- atau 0,74 %.
- (4). Desa Long Nah (Dusun Muara Dun). Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan HPH Bina Desa Hutan pada Desa Long Nah (Dusun Muara Dun) pada bulan Februari 1995 sebesar Rp. 19.600.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 19.250.000,-. Kekurangan realisasi dari yang direncanakan sebesar Rp. 350.000,- atau 1,11 %.

Untuk jelasnya mengenai perkembangan rencana dan realiasi anggaran PT. Oceanias Timber Products untuk pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan mulai tahun 1991/1992 - 1994/1995 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12. Rencana dan realisasi anggaran HPH Bina Desa Hutan Tahun 1992/1993 - 1994/1995, PT. OTP.

Tahun	Rencana (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%	Keterangan
1991/1992	25.000.000,-	23.153.000,-	92,61	Desa Ma. Dun
1992/1993	80.500.000,-	69.190.000,-	85,95	Desa Ma. Dun
1993/1994	94.000.000,-	100.040.000,-	106,43	Desa Ma. Dun
1994/1995	17.750.000,-	18.250.000,-	102,82	Desa Melan
1994/1995	19.600.000,-	20.250.000,-	100,74	Desa Gmr. Baru
1994/1995	19.600.000,-	19.250.000,-	98,89	Desa Ma. Dun
Jumlah	256.450.000,-	250.133.000,-	97,54	

Sumber : PT. Oceanias Timber Products 1995.

Pada Tabel 5.12 di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah anggaran yang direncanakan oleh PT. Oceanias Timber Products untuk pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan yaitu sebesar Rp. 256.450.000,- (1991/1992 - 1994/1995), telah direalisasikan sebesar Rp.250.133.000,- (97,54 %). Dari jumlah realisasi anggaran tersebut Rp. 211.633.000,- sekitar 82,52 % diantaranya digunakan di Dusun Muara Dun (Desa Long Nah) karena di tempat ini merupakan pusat lokasi pembinaan HPH Bina Desa Hutan.

Adapun jenis pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan yang telah dilakukan oleh PT. Oceanias Timber Products tersebut secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

- (1). Pertanian Menetap. Kegiatan ini meliputi, pembuatan irigasi, Pencetakan Sawah Kering/Perladangan, pemberian bantuan berupa alat-alat pertanian, benih/bibit, pupuk, herbisida, insektisida, peternakan, bantuan penyuluhan pertanian, dan pemasaran hasil pertanian.
- (2). Peningkatan Ekonomi. Kegiatan ini meliputi, pembinaan koperasi, pembinaan home industri, pelaksanaan sistem Bapak Angkat dan penyediaan lapangan berusaha.
- (3). Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum. Kegiatan ini meliputi, perbaikan jalan, perbaikan jembatan/kalbet, penyediaan listrik pedesaan, penyediaan air bersih, perbaikan balai desa/pertemuan (Lamin Adat), perbaikan dermaga/transport, bangunan fisik keagamaan (perbaikan Mushalla, perbaikan Gereja), bangunan fisik pendidikan (perbaikan Gedung Sekolah dan Gedung Perpustakaan), dan perbaikan lapangan Olah Raga.
- (4). Sosial Budaya. Kegiatan ini meliputi, pendidikan (bantuan